

## **BAB IV**

### **PERAN MARIA ULLFAH SETELAH MASA KEMERDEKAAN TAHUN 1946-1988**

#### **A. Maria Ullfah Menteri Perempuan Pertama serta Kebijakannya**

Keadaan politik Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dapat dikatakan belum stabil meskipun telah dibentuk pemerintahan yang berdaulat. Sebagai negara yang baru memproklamkan kemerdekaannya, Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tantangan dari luar tersebut datang dari pemerintah Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945 di Tanjung Priok. Pada awalnya kedatangan tentara sekutu disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia, tetapi setelah bangsa Indonesia tahu bahwa dalam pasukan sekutu terdapat serdadu Belanda dan aparat NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*) sikap bangsa Indonesia berubah menjadi curiga.<sup>1</sup>

Selain menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa, pemerintah Indonesia harus menghadapi permasalahan yang datang dari dalam, yaitu perebutan kursi pimpinan revolusi. Soekarno-Hatta yang sejak awal menjadi pimpinan revolusi, akibat kerjasamanya dengan pemerintah militer Jepang, mulai dianggap kurang tepat oleh beberapa tokoh non-kooperatif, terutama Tan Malaka.<sup>2</sup> Tan Malaka yang berambisi untuk menggulingkan Soekarno-Hatta berusaha

---

<sup>1</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 186.

<sup>2</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid II*. (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 73.

mempengaruhi beberapa tokoh non-kooperatif, seperti Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Pulau Jawa melihat langsung betapa besar dukungan rakyat kepada Soekarno-Hatta, sehingga ia memutuskan untuk mendukung Soekarno-Hatta. Tidak mendapat dukungan dari Sjahrir, selanjutnya Tan Malaka melakukan pertemuan langsung dengan Ir. Soekarno.

Sjahrir yang diberitahu Moh. Hatta tentang pertemuan tersebut kanget dan segera melakukan pertemuan dengan Moh. Hatta di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Sjahrir menceritakan betapa berbahayanya jika di masa depan Tan Malaka menjadi presiden dan menerapkan rencana perjuangannya. Sebagai upaya untuk mencegah perpindahan kekuasaan ke tangan Tan Malaka, maka Sjahrir membujuk Moh. Hatta untuk mengeluarkan Maklumat 3 November yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk pembentukan partai politik.<sup>3</sup> Tujuan dari dikeluarkannya maklumat tersebut adalah agar melalui partai-partai politik tersebut dapat memperkuat perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Selain itu, partai-partai politik yang ada diharapkan dapat memimpin segenap aliran yang ada dalam masyarakat menuju jalan yang teratur.

Berdirinya partai-partai politik selanjutnya diikuti dengan perubahan sistem pemerintahan yang semula presidensial menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer yang berlaku mengharuskan kabinet bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang selama Perang Kemerdekaan berfungsi

---

<sup>3</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 203.

sebagai dewan perwakilan rakyat.<sup>4</sup> Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, akhirnya pada 14 November 1945 kabinet presidensial dibawah pimpinan presiden Soekarno digantikan oleh kabinet ministrial di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabinet Sjahrir I.

Umur Kabinet Sjahrir I tidak bertahan lama, pada pertengahan Februari 1946 Kabinet Sjahrir I banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama dari pihak oposisi. Persatuan Pejuang (PP) yang dibentuk oleh Tan Malaka pada tanggal 4-5 Januari 1946 di Surakarta menjadi partai oposisi yang terus berusaha menjatuhkan Kabinet Sjahrir I. Kebijakan diplomasi yang dibuat Sjahrir banyak ditentang partai politik dan hanya mendapatkan dukungan dari satu partai politik saja, yaitu dari partai Sosialis. Kebijakan luar negeri Sjahrir yang ingin membina hubungan baik dengan Inggris dan Belanda menjadi faktor penting jatuhnya Kabinet Sjahrir I.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam rapat PPKI dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggota KNIP berjumlah 137 orang dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo. Tugas KNIP berdasarkan UUD 1945 adalah membantu presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Selanjutnya, berdasarkan Maklumat No. X yang dikeluarkan Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP diberi kekuasaan legislatif serta dapat menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum MPR dan DPR terbentuk. Selain itu, tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP dengan ketuanya Sutan Sjahrir, lihat *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>5</sup> Rushdy Hoesein, *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 62.

Puncaknya pada tanggal 28 Februari 1946 diadakan sidang pleno KNIP Republik Indonesia di kota Solo.<sup>6</sup> Sidang tersebut dipimpin oleh Mr. Assaat dan dihadiri oleh 218 orang, yaitu 203 anggota KNIP (dari 294 anggota) serta 15 orang wakil Komite Nasional Daerah. Dalam persidangan Persatuan Perjuangan sangat gencar melakukan kritik terhadap pemerintah. Mereka mengkritik kebijakan Sjahrir yang tidak mencerminkan partai politik yang ada, sehingga dalam sidang terjadi pertentangan antara Kabinet Sjahrir I dan Persatuan Perjuangan yang menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen (KNIP) kepada kabinet Sjahrir. Akhirnya Kabinet Sjahrir I dinyatakan dimisioner pada tanggal 28 Februari 1946.

Pada awalnya ketika kabinet mengalami krisis, Presiden Soekarno telah menyerahkan pembentukan kabinet baru kepada Persatuan Perjuangan.<sup>7</sup> Namun, Persatuan Perjuangan yang disertai tugas tersebut baru mau membentuk kabinet jika program Persatuan Perjuangan dapat diterima semua oleh presiden. Program Persatuan Perjuangan yang berjumlah tujuh pasal belum dapat diterima oleh presiden, sehingga Presiden Soekarno menyerahkan kembali pembentukan kabinet baru kepada Sutan Sjahrir. Dalam pembentukan kabinet yang baru tersebut Presiden Soekarno memerintahkan Sjahrir untuk membentuk Kabinet Persatuan, yaitu kabinet dari semua partai rakyat (*coalitie cabinet*).

---

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 36.

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 29.

Sidang kedua KNIP selanjutnya dilaksanakan kembali pada tanggal 1 Maret 1946, dalam sidang tersebut diadakan pemungutan suara untuk menentukan politik luar negeri Indonesia. Pemungutan suara tersebut menghasilkan 140 suara setuju, 67 suara tidak setuju, dan 18 suara *blanco*, jadi pada umumnya sidang tersebut mendukung kebijakan pemerintah.<sup>8</sup> Pada tanggal 2 Maret 1946 Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan bahwa Sjahrir terpilih kembali menjadi formatir kabinet. Sehingga dalam sidang pleno hari ketiga KNIP pada tanggal 3 Maret 1946 memutuskan, bahwa Presiden Soekarno meminta kepada Sjahrir untuk membentuk kabinet baru dengan ketentuan bahwa kabinet baru harus bersifat koalisi kabinet berdasarkan program pemerintah yang lima pasal.<sup>9</sup> Sebagai seorang formatir kabinet, Sjahrir memiliki peluang untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi dalam penyusunan kabinet yang baru tersebut Sjahrir lebih bertindak hati-hati dengan mengikutsertakan partai-partai lainnya, seperti PSI (Partai Sosialis Indonesia), PSII, Masyumi, Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), Parkindo, dan Badan Kongres Pemuda.

Kabinet Sjahrir II dilantik pada 12 Maret 1946.<sup>10</sup> Dimasukkannya beberapa tokoh baru dalam Kabinet Sjahrir II tidak banyak berpengaruh, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya menteri yang mengundurkan diri atau bahkan tidak bersedia menjadi menteri. Beberapa menteri yang menolak jabatan dalam kabinet adalah Samadikun yang diangkat sebagai Menteri Muda dalam

---

<sup>8</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>9</sup> P.N.H. Simanjuntak, *loc.cit.*,

<sup>10</sup> Susunan Kabinet Sjahrir II dapat dilihat dalam lampiran 7, hlm. 215.

Negeri, Sjamsu Harya Udaja yang diangkat menjadi Menteri Muda Perdagangan dan Perindustrian, Moh. Sjafei sebagai Menteri Pengajaran. Sedangkan menteri yang berhenti dari jabatannya adalah Suwadi Menteri Kehakiman dan Rasad Menteri Pertanian dan Perindustrian.

Kabinet Sjahrir II memiliki program kerja yang terdiri atas lima program pokok dasar, yaitu:<sup>11</sup>

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka 100%
2. Mempersiapkan rakyat negara di segala lapangan politik, ketentraman, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia
3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis
4. Berusaha sekuat-kuatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian
5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam UUD pasal 33.

Kelima program pokok dasar program Kabinet Sjahrir II pada dasarnya adalah hasil dari pemikiran Soekarno-Hatta, sehingga kelima program pokok dasar Kabinet Sjahrir II diberi nama “lima pokok dari Soekarno”.

Sebagai seorang Perdana Menteri, Sjahrir banyak melakukan perubahan besar dalam kabinetnya yang kedua. Selain mengangkat beberapa menteri muda dan mengikutsertakan beberapa partai-partai politik, Sjahrir juga memasukan satu nama perempuan dalam kabinetnya. Untuk pertama kalinya dalam Kabinet Republik Indonesia ditunjuk seorang perempuan untuk duduk dalam kabinet, yaitu Ny. Maria Ullfah Santoso sebagai Menteri Sosial.<sup>12</sup> Pengangkatan tersebut

---

<sup>11</sup> *Kedaulatan Rakyat*, Rabu 6 Maret 1946.

<sup>12</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 30.

mendapatkan sambutan baik dari beberapa organisasi perempuan Indonesia, salah satunya dari Badan Kongres Wanita Indonesia yang langsung mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta.<sup>13</sup>

Maria Ullfah diangkat menjadi Menteri Sosial pada usia 35 tahun.<sup>14</sup> Sebelum menjabat sebagai Menteri Sosial, pada awalnya Maria Ullfah ditawarkan oleh Sjahrir untuk menjadi Menteri tanpa Porto Folio (menteri non-departemen). “Tadinya saya ditawarkan menjadi Menteri tanpa Porto Folio karena Sjahrir ingin memperlihatkan bahwa Republik Indonesia bukan boneka atau buatan Jepang, karena di Jepang pada waktu itu wanita tidak sama kedudukannya dengan pria”, tulis Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*. Sjahrir sengaja memilih Maria Ullfah karena ia sudah memahami bagaimana sifat Maria Ullfah.

Pada saat perjalanan pulang dari Solo menuju Jakarta, Sjahrir membahas pencalonan Maria Ullfah dengan koleganya dari Partai Sosialis yaitu Sudarpo Sastrosatomo, tetapi dalam buku *Perjuangan Revolusi* percakapan dilakukan dengan Soebadio Sastrosatomo.<sup>15</sup> Keduanya membicarakan tentang kemungkinan

---

<sup>13</sup> Sejak tanggal 4 Januari 1946 ibu kota negara Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta terpaksa pindah ke Yogyakarta akibat keadaan ibu kota yang sudah tidak kondusif. Terjadinya beberapa peristiwa kerusuhan yang disebabkan oleh pasukan KNIL membuat keadaan ibu kota menjadi tidak aman lagi. Selain Presiden dan Wakil Presiden yang pindah ke Yogyakarta terdapat beberapa kementerian yang pindah ke Yogyakarta, sedangkan Sjahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri tetap tinggal di Jakarta, lihat Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 200-203; lihat Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>14</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Menteri Sosial Banyak Urusan”, *Historia*, Nomor 1, 2012, hlm. 63.

<sup>15</sup> Soebadio Sastrosatomo, *op.cit.*, hlm. 237.

mengikutsertakan seorang perempuan dalam kabinet yang akan dibentuk Sjahrir. Sjahrir selanjutnya mengundang Maria Ulfah untuk bergabung dalam diskusi tersebut. Waktu Sjahrir menyatakan niatnya untuk mengangkat Maria Ulfah menjadi Menteri Sosial, Maria Ulfah sedikit heran dan bertanya kepada Sjahrir mengapa ia dipilih. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Sjahrir, bahwa Maria Ulfah sebagai Menteri Sosial harus menjalankan tugas khusus yang diterima Sjahrir dari sekutu, yaitu mengeluarkan tahanan wanita dan anak-anak dari kamp-kamp Jepang.<sup>16</sup> Menurut Sjahrir jabatan Menteri Sosial sangat tepat jika diberikan kepada perempuan, karena tugas tersebut berkaitan erat dengan sekutu. Pihak sekutu sangat menghormati kedudukan seorang perempuan (*lady first*), jadi ketika tugas tersebut dilakukan Maria Ulfah maka pihak Republik Indonesia dapat melakukan pembicaraan dengan tentara sekutu.

Mendengar tawaran dari Sjahrir Maria Ulfah merasa ragu dan belum siap untuk menjadi menteri. Keraguan Maria Ulfah tersebut dilatar belakangi oleh rasa kurang percaya dirinya yang belum terlalu berpengalaman dalam bidang tersebut, Maria Ulfah merasa masih ada tokoh perempuan lain yang lebih berpengalaman yaitu S.K Trimurty. Sjahrir yang melihat kecemasan Maria Ulfah berkata, “Kau kira tak dapat menjalankan pekerjaan itu, kita semua belum pernah menjadi Menteri dan saya tahu kau orang yang cukup berani”.<sup>17</sup> Maria Ulfah akhirnya menerima jabatan Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II dan mulai bekerja

---

<sup>16</sup> Maria Ulfah Subadio, “Bung Sjahrir”, *Mengenang Sjahrir*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1980), hlm. 94.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

ketika Kabinet Sjahrir II resmi dilantik. Sjahrir memilih sosok Maria Ullfah yang bukan berasal dari partai politik, melainkan tokoh perempuan yang dikenal sebagai pejuang kemajuan golongan perempuan. “Saya tidak mewakili GWS, melainkan saya semata-mata orang Perwari”, kata Maria Ullfah saat diwawancarai Mansur Amin dari Majalah *Tempo*.<sup>18</sup> GWS atau Gerakan Wanita Sosialis merupakan organisasi perempuan dari PSI. Pada saat diangkat menjadi Menteri Sosial Maria Ullfah belum bergabung ke PSI, ia masih aktif di organisasi-organisasi perempuan seperti Perwari dan Kowani (Kongres Wanita Indonesia).

Sebagai seorang Perdana Menteri Sjahrir mempunyai alasan mengapa posisi Menteri Sosial harus dijabat oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah Maria Ullfah. Subadio Sastrosatomo dalam bukunya *Perjuangan Revolusi* menyebutkan beberapa alasan mengapa Sjahrir memilih Maria Ullfah.<sup>19</sup> Pertama karena Maria Ullfah merupakan wakil kaum perempuan di pemerintahan. Kaum perempuan Indonesia berperan dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan menempatkan wakilnya dalam pemerintahan adalah hal yang layak dilakukan. Kedua, Sjahrir ingin membuktikan kepada dunia bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak semata-mata perjuangan untuk menuju kemerdekaan, tetapi juga perjuangan untuk kemanusiaan. Sebagai seorang Menteri Sosial Maria Ullfah diberi tugas utama yaitu untuk mengurus wanita dan anak-anak Belanda yang oleh Jepang ditawan dalam kamp-kamp di daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Apabila Palang Merah Internasional

---

<sup>18</sup> Mansur Amin, “Wanita itu Orang Banten”, *Tempo*, 26 Februari 1977.

<sup>19</sup> Soebadio Sastrosatomo, *loc.cit.*,

ingin memberi bantuan kepada para wanita dan anak-anak yang hidup dalam kamp tawanan, bantuan tersebut dapat disalurkan melalui Menteri Sosial. Ketiga, dengan menjadikan Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial berarti Sjahrir dapat berhubungan langsung dengan Panglima sekutu (Inggris) dan Kementerian Sosial menjadi memiliki tanggung jawab atas pemulangan para tawanan. Dengan adanya Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas pemulangan para tawanan, berarti Sjahrir telah mencegah sekutu mempergunakan Pemerintah Hindia Belanda atau Palang Merah Hindia Belanda untuk mengurus wanita dan anak-anak Belanda dalam kamp-kamp tawanan Jepang.

Salah satu tugas sekutu (Inggris) di Indonesia adalah mengurus para tawanan wanita dan anak-anak Belanda APWI (*Allied Prisoners of War and Internees*) yang ditawan di kamp-kamp Jepang. Sekutu dalam menjalankan tugasnya tersebut banyak mendapatkan perlawanan dari tentara Republik Indonesia, khususnya di daerah-daerah kekuasaan Republik Indonesia. Perlawanan dari tentara Republik Indonesia tersebut memaksa sekutu untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Republik Indonesia. Permasalahan tawanan wanita dan anak-anak tersebut merupakan masalah *urgent* dalam kaitannya dengan kedaulatan negara Republik Indonesia.<sup>20</sup> Hal tersebut dikarenakan dengan menyerahkan permasalahan tawanan wanita dan anak-anak Belanda kepada pihak Republik Indonesia, maka secara tidak langsung sekutu (Inggris) mulai mempercayai eksistensi Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946 Menguk Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 120.

Kementerian Sosial adalah sebuah kementerian yang mempunyai tugas khusus mengurus masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sejak Proklamasi, pemerintah Indonesia telah mendirikan Kementerian Sosial dengan Menteri Sosial pertamanya adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang dilantik pada 2 September 1945. Kementerian sosial dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia guna memperbaiki keadaan sosial bangsa pasca penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Berdasarkan UUD 1945 (sebelum diamandemen) tugas dan kewajiban Kementerian Sosial adalah untuk menjalankan beberapa pasal dalam UUD 1945 yaitu:<sup>22</sup>

1. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 33
  - a. Ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
  - b. Ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai rakyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.
  - c. Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
3. Pasal 34 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas maka dapat dikatakan segala hal yang berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Keadaan sosial masyarakat pasca penjajahan menjadi hal yang sangat

---

<sup>21</sup> Azmi, *Inventaris Arsip Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan dan Sosial (1946-1950)*. (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1986), hlm. i.

<sup>22</sup> ANRI, *Kementerian Perburuhan dan Sosial 1946-1950 No. 1, Berkas Mengenai Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial 20 Januari 1946- 2 Oktober 1947*.

*urgent* dan harus segera diperbaiki oleh pemerintah, maka dengan dibentuknya Kementerian Sosial diharapkan harkat dan martabat bangsa dapat terangkat dan lebih baik.

Kantor Kementerian Sosial pada awalnya terletak di Jakarta, tetapi dengan berpindahnya ibukota negara Republik Indonesia maka pada tanggal 10 Januari 1946 Kantor Kementerian Sosial dipindahkan ke Yogyakarta. Pada saat Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial, kantor Kementerian Sosial berada di Jalan Code nomor 2 Yogyakarta. Kementerian Sosial mempunyai lapangan pekerjaan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Menyelenggarakan politik sosial
2. Menyelenggarakan undang-undang dan peraturan sosial
3. Memajukan dan membimbing perasaan kesosialan dalam masyarakat dan lain-lain yang bersifat sosial, seperti usaha kesosialan dan penyuluhan tentang kesosialan.
4. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapangan kesosialan
5. Turut serta dalam menyelenggarakan “ketentraman masyarakat”
6. Perbaikan masyarakat (Fakir miskin, pemberantasan buta huruf, pengadaan undian, bantuan dan sokongan terhadap pengungsi dan korban perang).
7. Menerima orang-orang dari luar negeri

Pekerjaan-pekerjaan tersebut baru dilaksanakan ketika operasi pemulangan tawanan telah selesai dilakukan oleh Maria Ullfah.

Jabatan Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II adalah menggantikan Dr. Soedarsono yang pada masa Kabinet Sjahrir II diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dengan tugas khusus mengurus pengiriman

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. i-ii.

bantuan beras ke India yang sedang dilanda kelaparan.<sup>24</sup> Maria Ullfah memiliki tugas utama untuk melaksanakan proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang masih tinggal di daerah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut Maria Ullfah tidak sendiri, ia dibantu oleh PMI (Palang Merah Indonesia) dan beberapa mahasiswa pejuang. “Syukurlah pekerjaan yang mulia itu dapat dijalankan dengan baik berkat bantuan tentara kita (POPDA) yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa kita di bawah pimpinan Jenderal Soedibyo”, tulis Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*. POPDA atau Panitia Oeroesan Pemulangan Djepang merupakan tentara Republik Indonesia yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia.

Pelaksanaan proyek pemulangan wanita dan anak-anak Belanda tawanan perang Jepang dimulai sejak 9 Januari 1946, tetapi atas perjanjian antara sekutu dan pemerintah Republik Indonesia, proyek tersebut resmi dimulai pada 29 April 1946 dan berakhir 30 Mei 1947.<sup>25</sup> Sejak dimulainya proyek tersebut kondisi kamp-kamp tawanan sangat kurang memadai yang membuat kondisi kesehatan para tawanan menjadi buruk. Terlebih sejak tahun 1945 yaitu saat pendudukan Jepang berakhir diperkirakan terdapat tiga belas ribu orang interniran Eropa yang tewas.<sup>26</sup> Maria Ullfah yang bertugas mengurus pemulangan tawanan perang Jepang tersebut harus dapat memastikan keadaan tawanan tetap dalam keadaan

---

<sup>24</sup> Gadis Rasid, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 80.

<sup>25</sup> Rushdy Hoesein, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>26</sup> Bonnie Triyana, *dkk, op.cit.*, hlm. 64-65.

baik. Sehingga Maria Ulfah banyak melakukan perjalanan keliling daerah untuk mengunjungi kamp-kamp interniran.

Kedatangan Maria Ulfah ke kamp-kamp interniran tersebut, banyak menarik perhatian para tawanan perempuan. Para tawanan tersebut heran, mereka tidak menyangka bahwa yang bertanggung jawab atas pemulangan mereka adalah seorang perempuan. Kunjungan Maria Ulfah tersebut banyak dimanfaatkan para tawanan untuk meminta pemerah bibir (*lipstick*) dan bedak. “Waktu itu ada yang minta bedak, *lipstick* dan lain-lain sama saya”, kenang Maria Ulfah dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna Anwar.<sup>27</sup> Maria Ulfah menyadari hal tersebut dan merasa maklum, karena sudah lima tahun lamanya mereka tidak menggunakannya. Selain itu, para tawanan tersebut tidak berani meminta bedak dan *lipstick* kepada petugas laki-laki yang berjaga.

Proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang dilakukan oleh Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial banyak mendapatkan dukungan dari tentara Inggris. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan penyediaan pesawat terbang, obat-obatan, pakaian, bahan makanan, dan bahkan susu untuk anak-anak tawanan perang. Selanjutnya para interniran yang berasal dari berbagai kamp-kamp tawanan perang Jepang dikumpulkan di kota-kota besar yang memiliki Bandar udara atau stasiun kereta api. Pada umumnya para tawanan tersebut akan diberangkatkan dengan pesawat terbang dari lapangan terbang Panasan dekat kota Solo atau dengan menggunakan kereta api dari Yogyakarta.

---

<sup>27</sup> ANRI, Sejarah Lisan Tahun 1973-1994 No. 154, *Maria Ulfah- Dewi Fortuna Anwar Jalan Guntur 49*, 1983, kaset 3.

Pemulangan para interniran tersebut banyak mendapat gangguan dari tentara Belanda, sebelum memasuki Jakarta biasanya di daerah Kranji dan Bekasi para tentara Belanda sering menghambat perjalanan para tawanan. Belanda yang ingin kembali menguasai negara Republik Indonesia banyak melakukan usaha untuk menggagalkan misi penyelamatan tawanan tersebut, salah satunya adalah peristiwa 9 Juni 1946.<sup>28</sup> Di mana kapal perang *Evertsen* milik Belanda mencegat dua kapal pengangkut interniran yang sedang berlayar dari Madura ke Tegal. Kejadian tersebut jelas membuat pemerintah Republik kecewa dan melayangkan protes kepada sekutu.

Proyek pemulangan wanita dan anak-anak Belanda tawanan perang Jepang merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi Republik Indonesia. Proyek tersebut menjadi salah satu strategi diplomasi pemerintah Republik Indonesia yang baru akan genap satu tahun merdeka. Keberhasilan pemerintah Republik Indonesia dalam menangani proyek tersebut dapat dilihat dari jumlah tawanan wanita dan anak-anak Eropa yang dievakuasi dari kamp-kamp Jepang yaitu diperkirakan mencapai 36.000 orang, sedangkan tentara Jepang yang berhasil diangkut mencapai 35.545 orang.<sup>29</sup> Keberhasilan pemerintah dalam mengurus proyek tersebut semakin membuat dunia internasional mengakui keberadaan negara Republik Indonesia yang selalu dianggap Belanda sebagai “pemerintah semu”.

---

<sup>28</sup> Bonnie Triyana, dkk, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>29</sup> Rushdy Hoesein, *loc.cit.*,

Suatu peristiwa penting terjadi pada bulan Juni 1946, peristiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap jatuhnya Kabinet Sjahrir II. Pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sjahrir bersama Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo dan Maria Ullfah Menteri Sosial diculik gerombolan yang tidak bertanggung jawab, gerombolan tersebut berasal dari Persatuan Perjuangan yang tidak sepaham dengan Sjahrir.<sup>30</sup> Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia membuat Persatuan Perjuangan kecewa, karena dari awal Persatuan Perjuangan telah menjadi kelompok oposisi. Pidato Wakil Presiden Moh. Hatta tentang permintaan pemerintah kepada Belanda agar mengakui Republik secara *de facto* atas Jawa dan Sumantera dinilai sangat merugikan Republik Indonesia. Kejadian tersebut ditambah dengan penangkapan Tan Malaka dan beberapa tokoh Persatuan Perjuangan pada 18 Maret 1946. Kekecewaan atas dua kejadian di atas menjadi latar belakang penculikan Sjahrir dan rombongan di Surakarta.

Peristiwa penculikan Sjahrir dan rombongannya bermula pada tanggal 25 Juni 1946 ketika Sjahrir dan rombongannya berada di Surakarta.<sup>31</sup> Rencananya dari Surakarta rombongan akan menuju Yogyakarta untuk menghadiri sidang kabinet yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta. Sebelum ke Yogyakarta Sjahrir dan rombongan terlebih dahulu menginap di Surakarta, yaitu di bekas rumah kepala *Javaasche Bank*, Gladag. Pada malam harinya Sjahrir dan rombongan ditangkap dan dibawa ke tempat peristirahatan Kasunanan di Paras,

---

<sup>30</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>31</sup> A.H. Nasution dalam M. Yuanda Zara, *op.cit.*, hlm. 171.

Boyolali. Dalam penculikan tersebut sebenarnya Maria Ullfah dan Darmawan Mangunkusumo tidak masuk dalam daftar penangkapan, tetapi Abdul Kadir Yusuf dan pasukannya tidak mau mengambil resiko sehingga ikut menangkap keduanya.

Pemerintah pusat yang berkedudukan di Yogyakarta segera mengetahui peristiwa penculikan Sjahrir dan robongannya di Surakarta. Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut Presiden Soekarno mengadakan rapat kabinet lengkap sesuai rencana awal, yaitu pada tanggal 28 Juni 1946. Di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin peserta rapat mengusulkan agar selama keadaan gawat tersebut, semua kekuasaan dipindahkan kepada Presiden Soekarno dengan kabinet bertanggung jawab kepadanya.<sup>32</sup> Dengan kata lain sistem pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Presidensil. BP KNIP yang turut hadir dalam rapat tersebut menyetujui usul tersebut dengan syarat agar tanggung jawab para menteri kepada Presiden dan KNIP akan dikembalikan seperti semula ketika keadaan normal kembali.

Lebih lanjut pemerintah melakukan tindakan dengan mengumumkan bahwa seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya. Presiden Soekarno melalui Menteri Pertahanan Amir Syariuddin atas nama Dewan Menteri pada jam 1 malam tertanggal 29 Juni 1946 mengumumkan keadaan bahaya untuk seluruh wilayah Indonesia dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden 1946 No. 1 yang menyatakan:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

“berhubung dengan kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan Negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan kabinet dalam sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946 mengambil kekuasaan Pemerintah sepenuh-sepenuhnya untuk sementara waktu, sampai kembalinya keadaan biasa, yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya”.<sup>33</sup>

Keluarnya Maklumat Presiden tersebut diikuti pidato Presiden Soekarno pada 30 Juni 1946 melalui radio. Dalam pidato tersebut Presiden menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar ikut berusaha mengembalikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Sosial Maria Ulfah, serta rombongan lainnya yang ikut diculik. Menurut Presiden Soekarno, dalam berpolitik boleh terjadi perbedaan pendapat atau kritikan, tetapi tindakan penculikan merupakan suatu hal yang salah karena akan menurunkan dan merusak derajat bangsa di mata dunia.

Mendengar seruan Presiden Soekarno, maka pada tanggal 1 Juli 1946 pukul 04.00 WIB, Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Sosial Maria Ulfah, serta rombongan lainnya dibebaskan oleh satuan Tentara Republik Indonesia.<sup>34</sup> Meskipun Sjahrir telah bebas dan dapat kembali ke Jakarta, tetapi tangkup kekuasaan tetap dipegang Presiden Soekarno, sedangkan Sjahrir hanya duduk menjadi Menteri Luar Negeri. Dengan kata lain Kabinet Sjahrir II secara yuridis telah berakhir. Kabinet Sjahrir II hanya berusia 3 bulan 16 hari, dan kabinet tersebut jatuh bukan karena adanya

---

<sup>33</sup> Usaman Rabili dalam P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 36-37; “Kekoeasaan Pemerintah Sepenoech-Penoehnja Kembali Ketangan Presiden”, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 29 Juni 1946.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

mosi tidak percaya melainkan karena peristiwa penculikan Perdana Menteri Sjahrir serta dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden nomor 1 tahun 1946.

Sebagai upaya untuk memulai perundingan dengan Belanda, maka negara Republik Indonesia perlu membentuk kabinet yang baru. Pada tanggal 13 Agustus 1946 KNIP mengadakan rapat di Purworejo dan menghasilkan keputusan untuk mendesak presiden agar segera membentuk kabinet yang baru sebagai upaya menyelamatkan negara. Sjahrir terpilih kembali untuk menjadi formatir kabinet, karena Sjahrir dinilai sebagai orang yang mutlak diperlukan untuk menjalin hubungan yang berhasil dengan pihak Belanda dan Inggris. Kabinet Sjahrir III merupakan rangkaian Kabinet Republik Indonesia keempat yang terbentuk. Kabinet Sjahrir III disahkan dengan dikeluarkan Maklumat Presiden 1946 No. 3 tertanggal 2 Oktober 1946.<sup>35</sup> Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, maka dapat dikatakan Sjahrir terpilih kembali menjadi Perdana Menteri ketiga kalinya secara berturut-turut.

Sebelum Kabinet Sjahrir III terbentuk, negara Republik Indonesia mengalami sebuah peristiwa besar yang disebut Peristiwa 3 Juli 1946.<sup>36</sup> Peristiwa

---

<sup>35</sup> Koesnodiprodjo dalam P.N.H. Simanjuntak, *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>36</sup> Peristiwa 3 Juli 1946 adalah sebuah usaha kudeta terhadap pemerintah yang dilakukan oleh tokoh oposisi sebagai upaya balasan kepada pemerintah karena peristiwa penangkapan beberapa tokoh oposisi seperti Chaerul Saleh, Pandu Kartawiguna, Adam Malik, Ibnu Parna, Surip Suprasito, dan Joyopranoto pada tanggal 2 Juli 1946. Usaha kudeta tersebut dipimpin oleh Jenderal Sudarsono dan Mayor Abdul Kadir Yusuf. Dalam usaha kudeta tersebut Jenderal Sudarsono mengajukan tiga naskah lanjutan dari Maklumat Presiden tahun 1946 No. 1. Ketiga naskah tersebut disusun oleh Muh. Yamin dan diberi nama naskah nomor 2, 3, dan 4. Kudeta berakhir pada hari itu juga dengan ditangkapnya Jenderal Sudarsono dan para tokoh oposisi lainnya, lihat M. Yuanda Zara, *op.cit.* hlm. 193-200.

tersebut merupakan wujud usaha kudeta yang dilakukan bangsa sendiri kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah keadaan aman maka dibentuklah kabinet yang baru yaitu Kabinet Sjahrir III dan secara otomatis Presiden Soekarno mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada Perdana Menteri Sjahrir. Pengembalian kekuasaan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden nomor 2 Tahun 1946.

Kabinet Sjahrir III dilantik pada tanggal 5 Oktober 1946.<sup>37</sup> Komposisi kabinet Sjarir yang baru masih menggunakan kabinet koalisi longgar yang terdiri atas beberapa partai. Sedangkan untuk program kerja dari Kabinet Sjahrir III masih melanjutkan program kerja dari Kabinet Sjahrir II. Maria Ullfah dalam Kabinet Sjahrir III masih menjabat sebagai Menteri Sosial dengan tugas yang sama, tetapi Maria Ullfah juga menangani persoalan buruh. Sebagai upaya untuk menangani persoalan buruh Maria Ullfah mengangkat seorang pejabat untuk duduk sebagai Kepala Bagian Perburuhan di Kementerian Sosial.<sup>38</sup> Maria Ullfah mengangkat Wilopo sebagai Kepala Bagian Perburuhan yang selanjutnya diubah menjadi Kepala Jawatan Perburuhan. Masalah perburuhan kelak melalui Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 akan diserahkan kepada Kementerian Perburuhan dengan S.K. Trimurthy sebagai menteri Perburuhan yang pertama.

Menangani masalah perburuhan merupakan cita-cita Maria Ullfah sejak kuliah di Leiden, Belanda. Maria Ullfah yang menjabat Menteri Sosial dalam

---

<sup>37</sup> Susunan Anggota Kabinet Sjahrir III dapat dilihat di lampiran 7, hlm. 216.

<sup>38</sup> Bonnie Triyana, dkk, *op.cit.*, hlm. 66.

Kabinet Sjahrir III, memberikan tugas kepada Wilopo selaku Kepala Jawatan Perburuhan untuk menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Perburuhan. “Segala peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan saya yang bikin. Yu Tri Cuma tinggal neken saja”, kata Wilopo dalam wawancaranya dengan Majalah *Tempo*.<sup>39</sup> Rancangan Undang-Undang Perburuhan telah dimulai ketika Maria Ulfah menjabat sebagai Menteri Sosial, sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjamin dan memberikan kekuatan hukum terhadap posisi buruh di Indonesia.

Selain Undang-Undang Perburuhan pada masa Maria Ulfah menjabat sebagai Menteri Sosial, untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyokong bahkan menganjurkan kaum buruh untuk memperingati hari buruh sedunia 1 Mei (*May Day*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Maklumat Kementerian Sosial yang diterbitkan kepada seluruh kantor agar tetap membayar upah buruhnya yang mengikuti perayaan hari buruh sedunia. Maklumat tersebut berbunyi:

“Mengingat akan arti hari 1 Mei untuk kaum buruh maka diumumkan, kepada semua kantor Jawatan Pemerintah, Kepala Daerah, serta pimpinan perusahaan untuk menghargai hari tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pegawai dan buruh untuk merayakannya. Kepada buruh harian yang ikut merayakan hari 1 Mei diberi gaji terus untuk hari itu. Kepada kantor-kantor, jawatan-jawatan, dan perusahaan-perusahaan tersebut di atas diperkenankan mengibarkan bendera Merah disamping Sang Merah Putih”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Anonim, “Wilopo dan Pohon Ditengah Kekacauan”, *Tempo*, No. 6, 1977, hlm. 29.

<sup>40</sup> “Maklumat Kementerian Sosial”, *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 27 April 1946.

Maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tersebut merupakan jawaban pemerintah atas tuntutan gerakan buruh yang ingin ikut memperingati hari buruh. Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap gerakan buruh tersebut mengundang simpati dari gerakan buruh Australia yang tergabung dalam “*Mackay Trade and Labour Council*”. Maria Ullfah selaku Menteri Sosial menerima sebuah lambang persahabatan dari kaum buruh Australia pada bulan November 1946. Hal tersebut merupakan wujud penghargaan gerakan buruh Australia atas usaha Maria Ullfah dalam memperjuangkan nasib buruh di Republik Indonesia.

Setelah tugas utama Maria Ullfah untuk mengembalikan para tawanan perang Jepang selesai, maka Maria Ullfah kembali menjalani pekerjaan rutin Menteri Sosial, yaitu membimbing kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, mengusahakan perbekalan untuk lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Umur Kabinet Sjahrir III tidak bertahan lama, memasuki bulan Juni 1947 kondisi politik Indonesia kembali memanas. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidak sesuaian pendapat antara partai-partai politik dalam menghadapi konsensi Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda.<sup>41</sup> Terjadinya perpecahan di dalam tubuh Partai Sosialis yang menjadi pendukung utama Kabinet Sjahrir III menjadi salah satu faktor utama jatuhnya Kabinet Sjahrir III.

Partai Sosialis selanjutnya pecah menjadi dua, yaitu Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Sjahrir dan Partai Sosialis atau yang lebih dikenal dengan nama Sayap Kiri di bawah pimpinan Amir Syarifuddin. Munculnya resolusi-resolusi dari berbagai partai politik ketika sidang Kabinet pada tanggal 26

---

<sup>41</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 45.

Juni 1947 mengakibatkan Kabinet menyerahkan *portefeuille* kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 1947 pukul 03.15 WIB Presiden Soekarno menerima portepel Sjahrir tersebut. Dengan diterimanya portepel Sjahrir maka berakhirilah masa kerja Kabinet Sjahrir yang ketiga, dengan masa kerja selama delapan bulan dua puluh lima hari.<sup>42</sup> Berakhirnya masa kerja Kabinet Sjahrir III, maka berakhir pula tugas Maria Ullfah sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir III. Selama dua periode Kabinet Sjahrir, Maria Ullfah adalah perempuan pertama yang menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Selama Maria Ullfah menjabat sebagai Menteri Sosial, ia mengisahkan empat peristiwa yang mengesankan dalam hidupnya. Peristiwa pertama adalah perayaan satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1946 di Pegangsaan Timur.<sup>43</sup> Maria Ullfah yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial meminta izin kepada Presiden Soekarno untuk tidak mengikuti upacara perayaan satu tahun berdirinya Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada hari peringatan satu tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Maria Ullfah sudah berjanji kepada kaum ibu di Jakarta untuk ikut serta dalam Pawai Wanita yang akan menuju ke Pegangsaan Timur. Pawai tersebut diprakarsai oleh Setiati dari Barisan Buruh Wanita.

Kaum ibu-ibu yang berpakaian merah-putih telah siap memulai pawai, mereka berangkat dari kantor WANI (Wanita Negara Indonesia). Rencananya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 81.

rombongan pawai akan menuju ke Pegangsaan Timur, tetapi rombongan tidak dapat masuk ke jalan Pegangsaan Timur karena dihadang oleh tentara Gurkha. Akhirnya rombongan memutuskan untuk mencari jalan lain, yaitu jalan menuju halaman belakang Pegangsaan Timur. Ternyata di halaman belakang Pegangsaan Timur juga dijaga tentara Gurkha. Rombongan ibu-ibu Jakarta pada akhirnya tidak diizinkan masuk, padahal di Pegangsaan Timur tengah berlangsung upacara penyerahan “Tugu Proklamasi”, yaitu sebuah tugu yang dipersembahkan oleh kaum ibu-ibu Jakarta kepada pemerintah Republik Indonesia. Seorang wartawan berita Inggris Reuter melihat Maria Ullfah berada di tengah-tengah kaum ibu yang berdemo karena tidak boleh masuk mengikuti upacara penyerahan. Wartawan tersebut melaporkan bahwa diantara kaum perempuan yang dihalangi masuk Pegangsaan Timur untuk menghadiri upacara penyerahan terdapat Menteri Sosial Republik Indonesia.

Peristiwa kedua adalah ketika Maria Ullfah bertemu dengan Lord Louis Mountbatten, *Commander In Chief* (CIC) tentara sekutu yang berkedudukan di Singapura. Lord Louis Mountbatten datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Perdana Menteri RI dan Menteri Wanita Republik Indonesia.<sup>44</sup> Sebelum datang ke Jakarta pada tanggal 25 April 1946, terlebih dahulu markas komando sekutu di Singapura mengirimkan kawat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kawat pertama mengatakan Lord Louis Mountbatten ingin bertemu dengan Sjahrir, selanjutnya kawat kedua menyatakan bahwa ia ingin bertemu dengan menteri wanita RI. *”I wanna see that lady minister”*, kenang Maria Ullfah. Pada saat Lord

---

<sup>44</sup> Maria Ullfah Subadio, *op.cit.*, hlm. 95.

Louis Mountbatten datang ke Jakarta, Maria Ullfah sedang mengadakan kunjungan kerja ke Solo. Seorang petugas memberitahu Maria Ullfah untuk segera pergi ke Jakarta, karena ia sedang dicari Perdana Menteri Sjahrir. Mendengar berita tersebut, Maria Ullfah langsung berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Setibanya di Jakarta, Maria Ullfah langsung menuju ke Pegangsaan Timur 56 dimana Sjahrir tinggal. Bersama dengan Sjahrir dan Ir. Surachman Menteri Keuangan RI, Maria Ullfah pergi ke rumah Letnan Kolonel Van der Post yang menjadi penghubung tentara sekutu di jalan Imam Bonjol No. 2 Jakarta. Perjalanan dari Pegangsaan Timur menuju jalan Imam Bonjol harus dilakukan dengan hati-hati, karena hampir seluruh wilayah Jakarta telah dikuasai tentara Belanda. Akhirnya rombongan Maria Ullfah dapat tiba dengan selamat dan bisa bertemu dengan Lord Louis Mountbatten, Jenderal Mansergh, dan Letnan Kolonel Van der Post.

Peristiwa ketiga adalah perjalanan Maria Ullfah ke Sumatera pada tahun 1947. Perjalanan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama Pemerintah RI ke pulau Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, Menteri Dalam Negeri.<sup>45</sup> Selain itu, ikut pula Ir. Putuhena Menteri Pekerjaan Umum, Mr. Syafruddin Prawiranegara Menteri Keuangan, Mr. Soemarman Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri. Selain berkunjung, rombongan Maria Ullfah akan menghadiri sidang Komite Nasional di Bukit Tinggi. Rakyat Sumatera menyambut kedatangan rombongan Maria Ullfah dengan gembira, hal ini karena untuk pertama kalinya rakyat Sumatera melihat secara langsung para pemimpin

---

<sup>45</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 83.

dari negara mereka yang telah merdeka. Terlebih dengan hadirnya Maria Ullfah, sosok perempuan pertama yang duduk dalam pemerintahan.

Sambutan atas kedatangan Maria Ullfah pun datang dari ibu-ibu yang menjadi janda karena suami mereka menjadi korban saat revolusi sosial yang melanda Sumatera Timur. Di antara janda-janda tersebut terdapat janda Amir Hamzah, pujangga terkenal yang pernah menjadi guru bahasa Indonesia Maria Ullfah. Amir Hamzah yang harus meninggalkan studinya karena memenuhi kewajibannya sebagai calon Sultan Langkat, turut menjadi korban revolusi sosial yang digerakkan oleh kaum kiri yang menentang feodalisme. Akibat dari revolusi sosial tersebut hampir seluruh keluarga kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara menjadi korban. Dalam kunjungan tersebut Maria Ullfah juga melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Sosial, yaitu membantu para korban revolusi yang masih selamat. Para korban selamat disekap di kamp-kamp tawanan yang terletak di pegunungan dengan cuaca yang sangat dingin. Para korban selamat tersebut meminta bantuan Maria Ullfah, untuk menyediakan selimut dan pakaian tebal bagi mereka. Sebagai Menteri Sosial Maria Ullfah mengabulkan permintaan tersebut dan langsung memberikan bantuan berupa selimut dan pakaian tebal.

Tindakan Maria Ullfah tersebut langsung mendapatkan kritikan dari golongan kiri yang disampaikan oleh Abdul Karim. Mendapat kritikan perihal tindakannya tersebut, Maria Ullfah langsung marah dan menyampaikan kemarahannya melalui pidato di depan Masyarakat Sumatera Utara.

“Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, di mana keadilan merupakan salah satu silanya. Masyarakat wajib berlaku adil terhadap mereka. Tawanan ini ditempatkan di sana bukan atas

kemauan mereka sendiri. Maka karena itu orang harus berlaku adil pada mereka”, kata Maria Ullfah.<sup>46</sup>

Sikap berani Maria Ullfah tersebut mendapat pujian dari Mohammad Roem yang disampaikannya dalam karangannya di harian Kompas tanggal 18 Agustus 1981. Menurut Mohammad Roem sikap Maria Ullfah tersebut merupakan salah satu bukti sifat pemberani Maria Ullfah yang telah berkali-kali ditunjukkan dalam jalan hidupnya. Maria Ullfah merupakan sosok perempuan yang berani dan tegas dalam menjalani setiap tugas dan pekerjaannya. Akhirnya kunjungan rombongan pemerintah Republik Indonesia harus dihentikan, sehingga rencana perjalanan ke Aceh harus dibatalkan. Rombongan harus segera kembali ke Jakarta mengingat situasi politik yang tengah terjadi.

Peristiwa keempat atau peristiwa terakhir yang membuat Maria Ullfah terkesan adalah ketika ia melakukan perjalanan ke luar negeri. Bersama Perdana Menteri Sjahrir dan rombongan besar lainnya, Maria Ullfah diundang dalam acara *Inter Asian Relations Conference* yang diselenggarakan di New Delhi. Dalam acara tersebut Maria Ullfah bertemu dengan Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, dan Sarojini Naidu ketua dari *Inter Asian Relations Conference*. Sekembalinya dari New Delhi rombongan Maria Ullfah terlebih dahulu singgah ke Rangoon, Burma. Di Burma rombongan tidak dapat bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus pejuang kemerdekaan Burma Jenderal Aung Sang karena sedang menjalankan tugas di Upper, Burma. Meskipun tidak dapat bertemu dengan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Jenderal Aung Sang, Maria Ullfah tetap berkesempatan untuk bertemu dengan istrinya yang kemudian menjadi sahabat Maria Ullfah.

## **B. Maria Ullfah dalam Kabinet Parlementer**

Sejak Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno tanggal 27 Juni 1947, maka secara resmi Kabinet Sjahrir III dinyatakan demisioner.<sup>47</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kabinet yang dipimpin oleh Sjahrir telah jatuh sebanyak tiga kali. Kabinet Sjahrir III jatuh bukan karena adanya partai oposisi seperti pada tahun sebelumnya atau terjadi perubahan sistem pemerintah, tetapi dikarenakan adanya keretakan di dalam tubuh kabinet itu sendiri, terutama keretakan dalam Partai Sosialis yang menjadi pendukung utama Kabinet Sjahrir III. Partai-partai yang pada mulanya mendukung Sjahrir berbalik arah menjadi menentang konsensi Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda. Penjelasan Sjahrir mengenai keadaan politik Republik Indonesia dan masalah perundingan mengenai nota penegasan dari Belanda menimbulkan perdebatan di antara peserta sidang yang akhirnya memunculkan resolusi-resolusi dari berbagai partai.

Umumnya resolusi dari partai-partai peserta sidang menyatakan tidak setuju dengan kompromi yang terkandung di dalam surat menyurat antara delegasi Republik Indonesia dengan Komisi Jenderal, karena dinilai tidak menjamin adanya persatuan antara pemerintah dan rakyat. Atas penyerahan kembali portepel kabinet, maka presiden mengambil alih semua kekuasaan pemerintah untuk sementara waktu hingga terbentuk kabinet baru. Sebagai upaya untuk membentuk kabinet baru, Presiden Soekarno menunjuk empat orang formatir kabinet pada

---

<sup>47</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 50.

tanggal 30 Juni 1947. Keempat orang formatir kabinet tersebut adalah Mr. Amir Syarifuddin (Partai Sosialis), Dr. A.K. Gani (Partai Nasionalis Indonesia), Dr. Sukiman Wiryoanjoyo (Masyumi), dan Drs. Setiyajid (Partai Buruh Indonesia).<sup>48</sup> Keempat orang tersebut bertugas untuk menyusun kabinet koalisi berdasarkan nasional. Hingga batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 1 Juli 1947, keempat formatir tersebut tidak dapat menyusun kabinet baru dan menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

Kegagalan keempat formatir kabinet tersebut disebabkan oleh sikap partai Masyumi yang menuntut kursi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri.<sup>49</sup> Akibatnya dalam penyusunan kabinet baru partai Masyumi tidak diikutkan kembali untuk menjadi formatir kabinet. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1947 kabinet baru yang bercorak nasional telah terbentuk dengan Mr. Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menternya. Amir Syarifudin merupakan satu tokoh yang sangat diuntungkan dengan jatuhnya Sjahrir, ia adalah kawan Sjahrir di Partai Sosialis. Perbedaan pendapat diantara keduanya mengakibatkan Partai Sosialis pecah menjadi dua, yaitu satu Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sjahrir dan yang satu lagi Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifudin.

Kabinet Amir Syarifuddin yang terbentuk tidak mengikutsertakan partai Masyumi dalam keanggotaan kabinetnya. Sejak awal berdirinya Kabinet Amir Syarifuddin, Partai Masyumi telah mengeluarkan maklumat untuk menjelaskan

---

<sup>48</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>49</sup> P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 51.

pendirian partainya yang tidak ikut serta dalam kabinet. Maklumat tersebut berbunyi, “lebih baik mengundurkan diri, dari pada turut campur dengan tidak pernah menjamin bisa bekerja kolektif, dan seterusnya”.<sup>50</sup> Banyak kalangan yang menyambut baik keputusan tersebut, karena dengan tidak ikutnya Partai Masyumi dalam kabinet maka fanatisme yang terjadi di kampung-kampung akan berkurang dan persatuan di kalangan kepartaian tidak akan terganggu dengan propaganda-propaganda Partai Masyumi.

Corak Kabinet Amir Syarifuddin masih sama dengan Kabinet Sjahrir, yaitu diplomasi. Kalangan Masyumi yang tidak ikut duduk dalam kabinet menilai bentuk kabinet Amir Syarifuddin adalah kabinet tergopoh-gopoh yang tidak mungkin berdiri lama serta tidak akan memberi politik yang tegas.<sup>51</sup> Bagi Masyumi, corak kabinet yang masih meneruskan politik Sjahrir tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan tidak dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Sejak jatuhnya Kabinet Sjahrir, Partai Masyumi merupakan salah satu partai yang sangat senang dengan peristiwa tersebut. Partai Masyumi yang tidak menyetujui politik Sjahrir menyambut gembira penyerahan kekuasaan Kabinet Sjahrir III kepada presiden dan berharap bahwa Partai Masyumi dapat berkuasa, meskipun pada akhirnya Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin yang menjadi penguasa baru.

---

<sup>50</sup> ANRI, Kementerian Penerangan No. 239, *Berkas Mengenai Jatuhnya Kabinet Sjahrir*.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

Sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin diminta presiden untuk segera menyusun anggota kabinet yang baru. Pada saat akan menyusun anggota kabinetnya yang baru, Amir Syarifuddin menemui Maria Ullfah dan memintanya untuk duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. “Saya ditawari lagi untuk menjadi menteri oleh Amir Syarifuddin yang menggantikan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, tetapi saya tidak menerima tawaran tersebut”, tulis Maria Ullfah dalam buku *Mengenang Sjahrir*.<sup>52</sup> Maria Ullfah yang lebih bersimpati kepada Sjahrir memilih menolak tawaran tersebut. Penolakan tersebut ia sampaikan secara diplomatis, yaitu dengan alasan bahwa ia sudah capek dan ingin beristirahat dahulu. Amir Syarifudin selanjutnya menempatkan S.K. Trimurty sebagai Menteri Perburuhan dalam kabinet barunya.

Meskipun ditolak oleh Maria Ullfah, Amir Syarifuddin tidak menyerah begitu saja. Sebulan setelah peristiwa penolakan tersebut, Amir Syarifuddin datang kembali kepada Maria Ullfah dan memintanya untuk duduk sebagai Sekretaris Perdana Menteri sekaligus kepala Sekretariat Dewan Menteri.<sup>53</sup> Maria Ullfah tidak dapat menolak tawaran Amir Syarifuddin tersebut, karena bagi Amir Syarifuddin masa istirahat Maria Ullfah telah usai dan menurutnya sudah waktunya bagi Maria Ullfah untuk kembali menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara. Sejak tanggal 19 Agustus 1947 Maria Ullfah resmi sebagai Sekretaris Perdana Menteri sekaligus kepala Sekretariat Dewan Menteri. Jabatan tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi Direktur Kabinet RI.

---

<sup>52</sup> Maria Ullfah Subadio, *loc.cit.*,

<sup>53</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 96.

Meskipun kedudukannya sebagai Sekretaris Perdana Menteri tidak begitu mentereng seperti jabatannya ketika menjadi menteri, tetapi bagi Maria Ullfah jabatannya tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi bangsanya. Maria Ullfah menilai pekerjaannya sebagai Sekretaris Kabinet lebih berat dari pada menjadi seorang menteri. ”Pekerjaan sebagai Sekretaris Kabinet sebetulnya jauh lebih berat daripada pekerjaan sebagai menteri”, tulis Gadis Rasid dalam biografi Maria Ullfah.<sup>54</sup> Pekerjaan seorang menteri hanya menghadiri rapat kabinet dan mengambil keputusan, sedangkan pekerjaan seorang kepala Sekretaris Kabinet adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut. Maria Ullfah bertanggung jawab atas pelaksanaan segala keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat kabinet.

Jabatan Maria Ullfah sebagai Direktur Kabinet RI dilakukannya hingga tahun 1962, ia tercatat mengabdikan diri kepada enam perdana menteri, yaitu dari Amir Syarifuddin, Moh. Hatta, Moh. Natsir, Wilopo, Ali Sastroamidjojo hingga Djuanda.<sup>55</sup> Meskipun kabinet selalu berubah, tetapi Maria Ullfah sebagai pejabat administratif dan non-politik tetap memegang kendali administratif tertinggi. Selama lebih dari lima belas tahun Maria Ullfah mengabdikan sebagai Direktur Kabinet RI dan Maria Ullfah mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama dalam rangkaian Sekretaris Negara Republik Indonesia.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>55</sup> Rosihan Anwar, *In Memoriam Mengenang yang Wafat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 126.

Pasca terjadinya Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 mengakibatkan kondisi keamanan Republik Indonesia menjadi tidak menentu. Sering terjadinya peristiwa tembak-menembak antara tentara Republik Indonesia dengan tentara Belanda mengakibatkan kondisi keamanan negara semakin memburuk, terlebih dengan dikuasainya beberapa daerah di Indonesia oleh tentara Belanda. Kantor-kantor pemerintah yang berada di Jakarta diambil alih oleh pemerintah Belanda. Akibatnya staf kantor Perdana Menteri yang pada masa Sjahrir berada di Jakarta harus dipindahkan ke Yogyakarta. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai negara di dunia, seperti India dan Australia yang mengajukan permintaan resmi kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) agar masalah Indonesia-Belanda segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan.

Pada Agustus 1947, mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir bersama Menteri Luar Negeri H. Agoes Salim dan beberapa pemimpin lainnya berkesempatan untuk menyampaikan permasalahan Indonesia di dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sjahrir bersama pimpinan Indonesia lainnya mendapat kesempatan untuk menyampaikan protes kepada Dewan Keamanan PBB atas sikap tentara Belanda yang melakukan aksi militer di Indonesia. Terkait dengan masalah tersebut akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menghentikan pertikaian, gencatan senjata tersebut dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 220.

Selain itu, upaya yang ditempuh PBB untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda adalah dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Pertemuan antara ketiga negara tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk mengadakan kembali sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda akhirnya menghasilkan suatu persetujuan yang ditandatangani di geladak kapal *Renville* pada tanggal 17 Januari 1948. Karena perundingan dilaksanakan di atas kapal *Renville* maka perjanjian antara Indonesia dan Belanda dinamakan dengan “Perjanjian *Renville*”.

Pasca terjadinya perundingan *Renville*, beberapa partai politik menyatakan menentang hasil perundingan tersebut. Masyumi yang menjadi pendukung utama kabinet, menarik menteri-menterinya yang berada di dalam Kabinet Amir Syarifuddin. Selain Masyumi, PNI pun menolak Persetujuan *Renville* karena persetujuan tersebut tidak menjamin dengan tegas kelanjutan dan kedudukan Republik Indonesia. Kabinet Amir Syarifudin yang hanya mendapat dukungan dari Sayap Kiri akhirnya menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948.<sup>57</sup> Sesudah Kabinet Amir Syarifuddin dinyatakan demisioner, Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru yang terbentuk tidak lagi menggunakan sistem Parlementer, tetapi menggunakan sistem Presidensil dimana kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Amir Syarifuddin yang tersingkir dari pemerintahan memutuskan untuk menjadi oposisi dari Kabinet Hatta. Ia pun mendirikan Front Demokrasi Rakyat

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

(FDR) yang terdiri atas partai-partai dan organisasi kiri, seperti Partai Sosialis (PS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).<sup>58</sup> FDR menuntut pemerintah agar membubarkan Kabinet Hatta dan menggantinya dengan kabinet parlementer. Selain itu, FDR menuntut pula pembatalan Perjanjian Renville yang *notabene* merupakan produk dari Kabinet Amir Syarifuddin yang juga ketua FDR.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredam pihak oposisi. FDR yang pada awalnya menyetujui program nasional bentukan Panitia Tambunan tetap pada pendiriannya yaitu meminta agar Kabinet Hatta dibubarkan dan diganti dengan kabinet parlementer. Keinginan FDR tersebut ditolak oleh partai-partai lain yang menganggap Kabinet Hatta tidak perlu diganti atau tidak perlu melakukan *reshuffle*. Ditolaknya keinginan FDR oleh partai-partai membuat usaha FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta menuai kegagalan. FDR yang gagal menjatuhkan Kabinet Hatta, pada bulan Juli 1948 menyusun program sendiri yang disebut “Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru”.<sup>59</sup> Program baru tersebut diharapkan dapat menjatuhkan Kabinet Hatta dari pemerintahan. Tahap pertama

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

<sup>59</sup> “Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru” merupakan program baru FDR sebagai pihak oposisi. Program tersebut dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap parlementer dan non-parlementer. Tahap parlementer merupakan cara FDR untuk mempengaruhi Badan Pekerja KNIP agar mengeluarkan mosi untuk menjadikan program nasional sebagai program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kabinet parlementer, selanjutnya tahap non-parlementer merupakan langkah kedua yang digunakan FDR untuk merebut pemerintahan dengan menggunakan cara kekerasan, lihat *Ibid.*, hlm. 233-234.

dilakukan FDR dengan menggunakan kaum tani dan buruh dibawah organisasi SOBSI agar melakukan pemogokan pada bulan Juni 1948 di Delangu. Masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan perundingan dan pemogokan berakhir pada tanggal 18 Juli 1948.

Sekali lagi usaha FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta gagal, langkah selanjutnya yang diambil FDR adalah dengan melaksanakan tahap kedua dari program baru yaitu menggunakan cara kekerasan. Puncaknya adalah pada tanggal 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Pada peristiwa tersebut beberapa kantor-kantor pemerintah di wilayah Madiun berhasil dikuasai pasukan bersenjata. Selain itu, banyak terjadi aksi pembunuhan yang dilakukan pihak PKI, tercatat terdapat sebelas orang pejabat dan tujuh tokoh partai di Madiun dibunuh.<sup>60</sup> Di balai Kota Madiun, PKI memproklamirkan berdirinya “Sovyet Republik Indonesia”. Reaksi pemerintah Republik Indonesia atas peristiwa tersebut adalah dengan menyatakan tindakan PKI di Madiun merupakan tindakan pengacau negara dan harus segera di berantas, pernyataan tersebut disampaikan Hamengku Buwono IX selaku Menteri Negara. Akhir dari pemberontakan PKI Madiun adalah dengan ditangkapnya Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948.

Pasca pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah Republik Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin berkuasa kembali di Republik Indonesia. Perundingan demi perundingan yang dilakukan setelah *Renville* pada akhirnya menemui kegagalan dan berujung pada ultimatum dari pihak Belanda.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

Ultimatum tersebut dikirim kepada Jusuf Ronodipuro, *liaison officer* delegasi RI di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1948. Isi ultimatum tersebut adalah “Terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak terikat dengan Persetujuan *Renville* dan perjanjian gencatan senjata”.<sup>61</sup> Pihak delegasi RI yang berada di Jakarta tidak dapat mengirimkan kawat ke Yogyakarta karena hubungan telepon dan telegram dengan Yogyakarta sudah diputus oleh pihak Belanda. Akibat kejadian tersebut pemerintah Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta tidak mengetahui perkembangan terakhir yang terjadi.

Pada pagi harinya, yaitu tanggal 19 Desember 1948 pihak Belanda membuktikan ultimatum yang dikirim sehari sebelumnya dengan melakukan Agresi Militer Belanda II. Tentara Belanda mulai bergerak dengan menyerang Lapangan Terbang Maguwo di Yogyakarta. Selain itu, tentara Belanda juga menurunkan pasukan payungnya untuk menduduki pangkalan udara Maguwo. Akibat serangan tersebut akhirnya Yogyakarta berhasil dikuasai oleh pihak Belanda dan dengan segera para pimpinan Republik Indonesia berhasil ditawan, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Sebelum terjadi peristiwa penangkapan tersebut, para pemimpin Republik Indonesia telah membahas situasi politik yang tengah terjadi dan memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera dengan pimpinannya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara.<sup>62</sup> Mandat tersebut sebenarnya tidak pernah sampai ke tangan Mr. Syafruddin Prawiranegara, tetapi atas inisiatif Syafruddin bersama T.M. Hasan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>62</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 202.

dan Kolonel Hidayat akhirnya terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 22 Desember 1948 dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI.

Agresi Militer Belanda kedua tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia, terlebih bagi Maria Ullfah. Maria Ullfah yang sejak menjadi Menteri Sosial menetap di Yogyakarta harus tinggal terpisah dari Santoso yang tinggal di Solo karena bekerja pada Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada akhir pecan Santoso bersama dengan Soetoyo, kakak iparnya yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia berangkat ke Yogyakarta bersama dengan dua pegawai perempuan dari Departemen P dan K, Nani Soemadipradja dan Kayatun.<sup>63</sup> Ketika akan kembali ke Solo, Santoso mendapat kabar bahwa Maguwo telah dikuasai Belanda sehingga jalur kereta api Yogyakarta-Solo tidak beroperasi. Santoso yang merasa memiliki kewajiban di Solo memutuskan untuk kembali ke Solo. Bersama dengan kakak ipar dan dua pegawai perempuan dari Departemen P dan K, mereka memutuskan untuk pulang menggunakan mobil Soetoyo.

Di tengah perjalanan yaitu di persimpangan jalan menuju ke lapangan terbang Maguwo, mobil yang ditumpangi Santoso dihentikan oleh seorang kopral Belanda. Rombongan Santoso diminta untuk turun dari mobil dan berdiri dipinggir jalan bersama dengan beberapa petani yang kebetulan melintas. Tidak lama kemudian datang seorang tentara berpangkat sersan mayor yang datang dalam keadaan mabuk dan berteriak kepada Santoso dan rombongannya. "Itulah

---

<sup>63</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 99.

mereka orang Republik kotor persetan”, tulis Gadis Rasid dalam biografi Maria Ullfah.<sup>64</sup> Selanjutnya tentara tersebut mengeluarkan pistol dan langsung menembaki para tawanan, melihat tindakan tersebut kopral yang menghentikan rombongan Santoso berteriak,” Mayor ada wanita”, sehingga aksi penembakan dihentikan. Santoso dan Soetoyo yang tertembak akhirnya meninggal di tempat, sedangkan kedua pegawai perempuan yang ikut dalam rombongan selamat. Mereka ditawan di pos penjagaan tentara Belanda selama satu malam, keesokan harinya kedua pegawai tersebut dipulangkan ke Yogyakarta. Mayat Santoso dan Soetoyo dibiarkan tergeletak ditempat kejadian, atas permintaan keluarga mayat keduanya dievakuasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan dimakamkan di Yogyakarta.

Berita tentang peristiwa penembakan Santoso telah tersiar dikalangan wartawan-wartawan luar negeri. Mereka yang penasaran dengan keadaan di Yogyakarta memutuskan untuk melihat langsung keadaan Yogyakarta. Di antara wartawan tersebut terdapat Goerge Kahin, seorang sarjana Amerika yang sedang melakukan penelitian di Indonesia, ia juga merupakan sahabat lama Maria Ullfah. George Kahin dan rombongan wartawan lainnya datang ke PMI dan mendengar langsung bagaimana peristiwa penembakan tersebut terjadi. Berita penembakan tersebut langsung dikirim ke seluruh dunia dan bukan itu saja, berita tentang kematian Santoso pun digunakan Sjahrir dalam persidangan PBB yang membahas tentang gerakan militer Belanda di Republik Indonesia. Belanda yang selalu mengatakan bahwa aksi militernya di Indonesia merupakan aksi polisionil untuk

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

menertibkan orang-orang Indonesia yang bersenjata hanyalah *isapan jempol* belaka. Menanggapi peristiwa penembakan Santoso, militer Belanda memiliki pendapat tersendiri yaitu melalui siaran resmi militer Belanda yang dimuat dalam *Koran Pelita Rakjat*, 28 Februari 1949:

“Setelah ini mobil tersebut ditembaki, dengan akibat bahwa sopir tersebut kena tembakan. Kemudian mobil berhenti dan penumpang-penumpanganya keluar, komandan rombongan militer di tempat itu tampil kemuka. Ketika diadakan geledahan pada penumpang laki-laki, salah seorang di antara mereka mencoba menarik pistolnya yang disimpannya pada tali pinggangnya. Komandan militer kemudian menembak ketiga penumpang yang laki-laki dengan akibat terbunuhnya mereka semua”.<sup>65</sup>

Berita tentang peristiwa penembakan Santoso yang tersiar luas membuat Maria Ullfah dipanggil oleh tentara Belanda. Maria Ullfah dibawa ke markas tentara Belanda di Terban Taman untuk dimintai keterangannya terkait berita penembakan Santoso yang tersebar luas. Orang-orang yang melihat Maria Ullfah dibawa tentara Belanda mengira bahwa Maria Ullfah akan ditahan, tetapi setelah dimintai keterangan tentang berita tersebut Maria Ullfah dibebaskan.

Kabar tentang kematian Santoso sangat mengejutkan Raden Mohammad Achmad yang saat itu tinggal di Jalan Guntur 49, Jakarta. Sebulan setelah peristiwa tersebut Raden Mohammad Achmad sakit keras dan mengalami “koma”. Maria Ullfah dan Iwanah yang mendengar kabar bahwa ayah mereka sakit langsung pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat yang dipinjam oleh tentara Belanda. Sehari setelah kedatangan Maria Ullfah dan Iwanah, Raden Mohammad Achmad akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1949.

---

<sup>65</sup> Bonnie Triyana, dkk, “Empat Duka Dalam Semasa”, *op.cit.*, hlm. 48.

Dalam waktu kurang dari dua bulan Maria Ullfah telah kehilangan dua orang yang sangat ia cintai, suami dan ayahnya.

Sebagai upaya untuk menarik simpati dari Maria Ullfah, pemerintah Belanda mengirimkan utusan untuk datang ke rumahnya di Jalan Guntur 49. Utusan tersebut adalah Dr. Louis Graf, seorang Indilog (ahli mengenai Indonesia) lulusan Universitas Lieden, Belanda.<sup>66</sup> Dr. Louis Graf datang kepada Maria Ullfah untuk menyampaikan rasa belasungkawanya atas meninggalnya ayah dan suami Maria Ullfah. Selain itu, Dr. Louis Graf juga menyampaikan pesan dari pemerintah Belanda yang turut berduka cita sekaligus menyesal atas peristiwa di Maguwo yang menewaskan suami Maria Ullfah. Dr. Louis Graf selanjutnya menawarkan santunan berupa uang dari pemerintah Belanda yang kemudian ditolak Maria Ullfah.

Peristiwa tersebut selanjutnya diceritakan kepada ibu Santoso. Mendengar cerita tersebut ibu Santoso marah dan mempertanyakan bagaimana nasib kakak ipar Maria Ullfah yang telah menjanda akibat suaminya yang ikut tewas dalam peristiwa Maguwo. Kakak ipar Maria Ullfah yang seorang janda tanpa bekal pendidikan seperti Maria Ullfah masih harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Hal tersebut yang membuat Maria Ullfah akhirnya meminta bantuan kepada Drs. Boogaardt agar membantu kakak iparnya tersebut.

Berita tentang Agresi Militer Belanda kedua telah diterima oleh Dewan Keamanan PBB yang berada di Paris. Tindakan Belanda tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara seperti New Delhi yang diwakili oleh Perdana

---

<sup>66</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 101.

Menteri Nehru pada tanggal 20-23 Januari mengadakan konferensi mengenai sengketa Indonesia dan Belanda.<sup>67</sup> PBB melalui Dewan Keamanan pada tanggal 24 Januari 1949, mengeluarkan resolusi kepada Belanda agar menghentikan Agresi Militer yang tengah terjadi, selain itu PBB meminta agar para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan segera dibebaskan. Atas desakan Dewan Keamanan PBB dan beberapa negara akhirnya pemerintah Belanda mulai membuka kembali perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 13 Februari 1949 secara resmi menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia mau melakukan perundingan dengan pihak Belanda dengan syarat dikembalikannya pemerintahan RI ke Yogyakarta dan ditariknya pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB.<sup>68</sup> Menanggapi pernyataan Moh. Hatta, pihak Belanda akhirnya mengembalikan para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak Belanda kembali dilaksanakan di Yogyakarta yaitu pada tanggal 19-22 Juli 1949, perundingan tersebut dikenal dengan nama Konferensi Antar-Indonesia. Hasil dari konferensi tersebut adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan nama RIS. Selajutnya pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

---

<sup>67</sup> Slamet Muljana, *op.cit.*, hlm. 218.

<sup>68</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 262.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda pada akhirnya berbuah manis, pada tanggal 27 Desember 1949 secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia diseluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda (kecuali Papua). Pengakuan Belanda tersebut secara resmi mengakhiri perang kemerdekaan Indonesia dan merupakan suatu batu loncatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara merdeka dan berdaulat. Pasca penyerahan kedaulatan, Maria Ullfah diminta Moh. Hatta untuk kembali ke Jakarta dan memulai pekerjaannya sebagai Sekretaris Kabinet. Dalam wawancaranya dengan Dewi Fortuna Anwar, Maria Ullfah mengisahkan tentang kantor barunya di Kebon Sirih yang kurang layak digunakan sebagai kantor. Maria Ullfah meminta kepada Moh. Hatta agar kantor Sekretaris Kabinet dibuat lebih baik, menurut Maria Ullfah seharusnya kantor Sekretaris Kabinet dibuat lebih representatif dari pada kantor Uni-Belanda-Indonesia. Ucapan Maria Ullfah terbukti dengan adanya berbagai pemberontakan di dalam negeri, akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk awal yaitu negara kesatuan.

Berakhirnya RIS menandai kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia, dan hal tersebut menandai kembalinya Moh. Hatta kepada posisi awal yaitu sebagai Wakil Presiden. Posisi Perdana Menteri selanjutnya di pegang oleh Mohammad Natsir, yang menjabat Perdana Menteri mulai September 1950 hingga Maret 1951. Pada masa Kabinet Natsir, Maria Ullfah diusulkan oleh Mohammad Natsir selaku Perdana Menteri untuk menjadi wakil diplomatik Indonesia di negeri Belanda. Jabatan tersebut sama tingkatannya dengan *ambassador* Indonesia

di Belanda. Tawaran tersebut ditolak Maria Ullfah, karena bagi Maria Ullfah tenaga dan pikirannya masih diperlukan di dalam negeri. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Maria Ullfah bersama dengan Mr. Moh. Yamin menyambut Dr. Helen Keller seorang duta besar untuk Indonesia.<sup>69</sup> Pemerintah Indonesia mengundang Dr. Helen Keller ke Indonesia untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang Indonesia yang memiliki kekurangan, dalam hal ini cacat fisik untuk tetap bersemangat menjalani hidup. Kedatangan Dr. Helen Keller ke Indonesia merupakan wujud diplomasi pemerintah Indonesia dengan dunia Internasional.

Pada masa Kabinet Djuanda yaitu tahun 1957, Maria Ullfah yang masih menjabat sebagai Direktur Kabinet RI mendapat tugas dari Perdana Menteri Djuanda untuk melakukan perjalanan “*studytour*” ke Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina.<sup>70</sup> Perjalanan tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Selain itu, Maria Ullfah juga berkunjung ke *Institute of Public Administration*. Selanjutnya ketika sampai di Amerika Serikat dua pejabat pemerintah RI bergabung dengan Maria Ullfah, yaitu Soemarmo S.H. dari Departemen Dalam Negeri dan Ratmoko S.H. Hasil dari perjalanan tersebut adalah didirikannya suatu Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1958 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Djuanda.

---

<sup>69</sup> Anonim, “Tamun Asing di Indonesia”, *Majalah Merdeka*, No. VIII, 1955, hlm. 7.

<sup>70</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 106.

Lebih dari lima belas tahun Maria Ullfah menjabat sebagai Direktur Kabinet RI, mengabdikan kepada enam perdana menteri dari Amir Syarifuddin hingga Djuanda. Meskipun kabinet mengalami peristiwa jatuh bangun, tetapi kedudukan Maria Ullfah sebagai Direktur Kabinet RI tidak tergantikan. Maria Ullfah tetap pada kedudukannya sebagai pejabat administratif yang memegang kendali administrasi tertinggi dalam kabinet. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan titik awal dari tersingkirnya Maria Ullfah dari pemerintahan. Sejak tahun 1962 kantor Kabinet Perdana Menteri digabungkan dengan kantor Sekretariat Negara. Penggabungan tersebut memiliki arti tersendiri bagi Maria Ullfah, karena dengan digabungkannya kedua kantor tersebut maka kedudukan Maria Ullfah tergeser. Bersama dengan Maria Ullfah ikut pula disingkirkan pejabat-pejabat tinggi lainnya, seperti Saubari S.H, Imam Soedjahri S.H, dan Ali Budiardjo S.H.

Tersingkirnya Maria Ullfah dan beberapa pejabat tinggi lainnya dari Kabinet Perdana Menteri disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik yang tengah terjadi. Sejak tahun 1957 arah pemerintahan Republik Indonesia lebih condong ke kiri. Partai politik yang dianggap berbahaya bagi Partai Komunis Indonesia, seperti Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia disingkirkan. Presiden Soekarno yang mulai condong ke arah kiri, pada bulan Agustus 1960 melarang keberadaan Partai Masyumi dan PSI.<sup>71</sup> Maria Ullfah dan beberapa pejabat tinggi tersebut merupakan orang yang dekat dengan PSI. Meskipun Maria Ullfah dan

---

<sup>71</sup> Rosihan Anwar, *Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 179.

beberapa pejabat tinggi tersebut telah dibebaskan dari keanggotaan PSI, tetapi kedekatannya dengan Sjahrir dan beberapa tokoh PSI serta arah pemikiran yang searah dengan Sjahrir membuatnya dianggap sebagai “orang sosialis”. Posisinya sebagai Direktur Kabinet RI membuatnya dianggap sebagai tokoh yang berbahaya bagi keberlangsungan politik orang komunis, karena melalui Kabinet Perdana Menteri segala keputusan-keputusan penting dikelola. Akhirnya selama lebih dari lima belas tahun Maria Ulfah mengabdikan kepada negara Republik Indonesia pada tahun 1962 ia harus melepaskan jabatannya sebagai Direktur Kabinet RI. Maria Ulfah selanjutnya diangkat sebagai pegawai tinggi diperbantukan pada Sekretaris Negara.

### **C. Maria Ulfah dalam Kongres Wanita Indonesia**

Jatuhnya bom atom di dua kota besar Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima memaksa pihak Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada 14 Agustus 1945 di Potsdam. Penyerahan Jepang kepada sekutu tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan yang langsung dimanfaatkan oleh pihak Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara *de facto* sebenarnya pemerintah Jepang masih berkuasa di Indonesia, tetapi untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah Jepang tidak memiliki kewenangan lagi.<sup>72</sup> Pemerintah Jepang yang masih ada di Indonesia hanya bertugas untuk menjaga keamanan daerah Indonesia hingga pemerintah sekutu datang ke Indonesia. Dengan kata lain meskipun Indonesia

---

<sup>72</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 67.

telah memproklamkan kemerdekaan, status Indonesia masih dianggap sebagai daerah jajahan.

Selama masa pendudukan Jepang berbagai organisasi masa maupun organisasi politik dibekukan. Hanya organisasi bentukan Jepang yang dapat berdiri dan melakukan aktivitasnya. Salah satu organisasi yang dibekukan pemerintah Jepang tersebut adalah organisasi perempuan, dan sebagai gantinya didirikan *Fujinkai*. Organisasi tersebut merupakan organisasi perempuan yang dipimpin oleh istri-istri kepala daerah. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, organisasi *Fujinkai* dibubarkan oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito selaku ketua. Selanjutnya dibentuk organisasi perempuan baru yang diberi nama Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI), sedangkan di Jakarta didirikan organisasi Wanita Negara Indonesia (WANI).

Organisasi-organisasi perempuan mengadakan kongres pertamanya di Klaten pada tanggal 15-17 Desember 1945.<sup>73</sup> Kongres tersebut merupakan kongres pertama yang dilaksanakan organisasi-organisasi perempuan pasca kemerdekaan Indonesia. Kongres menghasilkan keputusan untuk menggabungkan PERWANI dan WANI menjadi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Sayangnya dalam kongres tersebut tidak berhasil membentuk suatu wadah pemersatu, Perwari yang awal pembentukannya diharapkan menjadi satu-satunya fusi dari organisasi perempuan hanya menjadi salah satu dari organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Selain itu, munculnya organisasi perempuan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

lama maupun baru mengakibatkan tidak adanya pemersatu dari organisasi-organisasi perempuan yang ada.

Pasca pendudukan Jepang Maria Ullfah bersama dengan beberapa tokoh perempuan Indonesia, seperti Ibu S. Kartowijono dan Sri Mangoensarkoro berinisiatif untuk menyatukan kembali organisasi pergerakan perempuan nasional yang sempat terhenti pada masa pendudukan Jepang.<sup>74</sup> Maria Ullfah yang saat itu menjabat sebagai *liaison officer* turut aktif kembali dalam organisasi pergerakan perempuan. Sebagai seorang *liaison officer* yang sering berhubungan dengan tentara Inggris, Maria Ullfah ditugasi oleh Menteri Penerangan untuk menghadiri kongres yang diadakan Pemuda Puteri Indonesia (PPI) yang akan membentuk PPI Pusat. Setelah menyelesaikan tugasnya di Solo, selanjutnya Maria Ullfah pergi ke Klaten untuk mengikuti kongres yang diadakan oleh organisasi-organisasi perempuan.

Setibanya di Klaten, Maria Ullfah yang akan menghadiri kongres mendapatkan pemeriksaan yang sangat ketat. Kondisi keamanan wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi yang tidak kondusif, mengakibatkan munculnya kecurigaan bagi orang-orang yang datang dari Jakarta. Orang-orang tersebut dicurigai sebagai mata-mata Belanda, karena pada saat itu terdengar berita tentang kedatangan mata-mata Belanda yang menggunakan tanda merah-biru-putih di badannya. Maria Ullfah yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan karena harus diperiksa badannya marah. “Saya diutus oleh

---

<sup>74</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, “Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)”, dalam *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah Kartini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 275.

pemerintah kita, masih dicurigai? Awas kalau saya sampai ditelanjangi, saya akan balik langsung ke Jakarta”, kata Maria Ullfah kepada petugas.<sup>75</sup> Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Maria Ullfah hanya diperiksa kondanya. Selain Maria Ullfah, seorang utusan dari Yogyakarta juga diperiksa. Utusan tersebut adalah Ny. Aisyah Hilal, anak dari K.H. Achmad Dahlan pendiri dari Muhammadiyah. Ny. Aisyah Hilal pun memprotes tindakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun Maria Ullfah dan Ny. Aisyah Hilal tidak jadi diperiksa, pada saat kongres keduanya selalu dikatakan sebagai “mata-mata yang tidak diperiksa”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan organisasi-organisasi perempuan yang ada, maka pada tanggal 24-26 Februari 1946 diadakan kembali konferensi organisasi-organisasi perempuan Indonesia di Solo. Konferensi tersebut berhasil mendirikan badan gabungan yang diberi nama Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang diketuai oleh Ny. Supardjo dan berkedudukan di Solo. Kowani didirikan sebagai suatu badan gabungan yang berintegrasi pada perjuangan kemerdekaan. Sehingga segala upaya mengenai masalah kedudukan perempuan dalam hukum keluarga dan perkawinan yang dijadikan pokok utama perjuangan pergerakan perempuan sebelum masa pendudukan Jepang untuk sementara dikesampingkan terlebih dahulu. Seluruh organisasi politik maupun non-politik, mengesampingkan cita-cita pribadi organisasinya demi mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>75</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 112.

Kongres kedua Kowani selanjutnya dilaksanakan di Madiun, pada tanggal 14-16 Juni 1946. Kongres tersebut memutuskan bahwa Kowani di bawah pimpinan Ny. Kartowijono akan membantu tentara republik dengan segala cara untuk melawan Belanda. Pasca kongres tersebut, organisasi perempuan yang tergabung dalam Kowani mengirimkan delegasi ke *All Asean Woman Conference*. Delegasi yang dikirim dalam acara tersebut adalah Maria Ullfah yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir II, Ny. Yetti Noor, dan Ny. S. Suryohadi. Kongres ketiga Kowani dilaksanakan di Magelang pada tanggal 14-16 Juli 1947. Kongres tersebut diketuai oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dengan Wakil Ketuannya adalah Maria Ullfah. Pasca kongres tersebut pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militernya di Indonesia. Kejadian tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I atau Clash I. Aksi militer Belanda yang dilancarkan di Indonesia mendapat tanggapan dari Gerakan Perempuan Belanda, yang selanjutnya ditanggapi kembali oleh Kowani dengan mengirimkan resolusi kepada *De Nederlandsche Vrouwenbeweging*.

Kongres keempat Kowani diadakan di Solo pada tanggal 26-28 Agustus 1948. Kongres tersebut diketuai oleh Ny. Pujobuntoro dan sebagai Wakil Ketuannya adalah Maria Ullfah. Tujuan diadakannya kongres adalah untuk meninjau gerak dan usaha Kowani dalam mengatasi perpecahan yang timbul sebagai akibat dari naskah Renville yang terasa pengaruhnya pada Kowani karena Kowani mempunyai anggota dari berbagai aliran.<sup>76</sup> Terjadinya perselisihan pendapat antara perkumpulan-perkumpulan perempuan yang disebabkan

---

<sup>76</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 94.

perbedaan paham politik mengakibatkan organisasi perempuan Islam keluar dari kongres. Adanya perbedaan pandangan antara organisasi perempuan yang berdasarkan agama Islam dan gerakan perempuan yang dekat dengan ideologi komunis tidak memungkinkan adanya kerjasama diantara kedua organisasi tersebut. Kongres keempat Kowani tersebut memutuskan untuk melakukan aksi keluar yaitu memelihara hubungan dengan luar negeri. Selain itu, kongres juga memutuskan untuk membentuk sebuah badan untuk memeriksa penggantian undang-undang dan undang-undang perkawinan di bawah pimpinan Maria Ullfah.<sup>77</sup> Badan lain yang dibentuk adalah badan urusan perburuhan, badan urusan *hygiene* sosial, dan badan urusan pemberantasan buta huruf.

Pasca Kongres keempat Kowani, terjadi pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Memburuknya kondisi keamanan di Indonesia pasca terjadinya pemberontakan PKI di Madiun diperparah dengan terjadinya Agresi Militer Belanda kedua di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948. Kedua peristiwa tersebut mengakibatkan keamanan di wilayah Indonesia semakin memburuk. Sebagai upaya untuk mempersatukan kembali gerakan perempuan dalam kancah perjuangan nasional, para pemimpin Kowani merasa perlu mengadakan pertemuan antara gerakan perempuan.

Pertemuan tersebut akhirnya diadakan di Yogyakarta tanggal 26 Agustus-2 September 1949, dengan dihadiri 82 perkumpulan perempuan dari Jawa dan luar

---

<sup>77</sup> Stuers, Cora Vreede-de, *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 178.

Jawa yang dipimpin oleh Maria Ullfah.<sup>78</sup> Dalam buku *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian* dikatakan bahwa pimpinan pertempuran tersebut adalah Ny. Soepeni. Perbedaan diantara kedua buku tersebut dikarenakan pada saat pertemuan berlangsung, permusyawaratan memutuskan untuk membentuk suatu Badan Kontak bernama “Permusyawaratan Wanita Indonesia”. Badan Kontak tersebut di Ketuai oleh Maria Ullfah, sedangkan Kowani yang merupakan badan tetap penghubung organisasi-organisasi perempuan, keberadaannya masih tetap ada dan diketuai oleh Ny. Soepeni. Kedua organisasi tersebut berdiri berdampingan, karena badan kontak yang baru merupakan Sekretariat yang masih bersifat administratif dan merupakan biro informasi, sedangkan Kowani merupakan Badan Federasi yang bersifat legislatif dan eksekutif. Badan Kontak tersebut berfungsi sebagai Sekretaris yang bertugas mengadakan hubungan dengan organisasi perempuan di daerah pendudukan Belanda.

Memasuki akhir tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa tersebut membuat ketegangan yang terjadi diantara kedua negara berakhir. Setelah perang kemerdekaan berakhir, pada tanggal 17 Agustus 1945 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>79</sup> Pasca penyerahan kedaulatan bangsa Indonesia memasuki masa pembangunan yang

---

<sup>78</sup> Sujatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia Ceramah tanggal 27 Maret 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta*. (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm. 14.

<sup>79</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 278.

meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial ekonomi pasca perang kemerdekaan pada umumnya memburuk, ditambah dengan adanya gangguan-gangguan di beberapa daerah. Organisasi perempuan yang pada masa perang kemerdekaan memusatkan perhatian dan tenaganya pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menganggap perlu mengadakan konsolidasi agar dapat dengan baik menghadapi tugas dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagai upaya untuk mempersatukan organisasi-organisasi perempuan agar dapat saling bekerjasama dalam membangun bangsa dengan saling menghargai ideologi masing-masing, maka perlu diadakan kembali kongres. Diharapkan dengan diadakannya kongres dapat tercapai persatuan dan kesatuan untuk membangun kembali negara Republik Indonesia pasca perang kemerdekaan. Sebagai upaya mempersatukan organisasi perempuan maka pada tanggal 24-28 November 1950 Badan Kontak yang berkedudukan di Jakarta bersama-sama dengan pengurus Kowani mengadakan kongres kelima di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari enam puluh tiga organisasi perempuan.

Kejadian penting yang terjadi dalam kongres adalah fusi antara dua badan federatif, yang di dalamnya terhimpun gerakan perempuan yang semasa revolusi kemerdekaan mengalami perpecahan.<sup>80</sup> Kongres tahun 1950 adalah kongres yang sangat penting bagi persatuan dan kesatuan organisasi perempuan, karena dalam kongres tersebut diputuskan untuk menggabungkan Badan Kontak dan Kowani

---

<sup>80</sup> Wieringa, Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 228.

dalam satu wadah yaitu Kongres Wanita Indonesia. Kongres Wanita Indonesia yang baru terbentuk berbeda dengan Kowani yang dibentuk pada masa perang kemerdekaan sehingga penulisan nama tidak boleh disingkat dan harus menggunakan nama “Kongres Wanita Indonesia”. Sejarawan Saskia Eleonora Wiering dalam bukunya yang berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* lebih memilih menggunakan nama KWI, federasi, atau Kongres Wanita agar lebih jelas dan singkat.<sup>81</sup> Selain itu, penggunaan istilah “Kowani” secara resmi kembali digunakan pada tahun 1964.

Kongres Wanita Indonesia tidak memiliki Dewan pimpinan seperti Kowani terdahulu, tetapi sebuah Sekretariat yang menampung segala masalah-masalah.<sup>82</sup> Setiap empat bulan diadakan pertemuan musyawarah di mana dibahas berbagai masalah yang ada. Keputusan mengenai dasar dan tujuan kongres hanya dapat dilakukan dengan menggunakan suara bulat, sedangkan keputusan-keputusan lainnya diambil dengan menggunakan suara terbanyak. Struktur organisasi semacam ini dianggap sangat lamban karena sulit sekali untuk mencapai suara bulat, tetapi dalam menyelesaikan masalah organisasi yang menggunakan struktur organisasi yang demikian yang dianggap dapat menampung berbagai masalah. Pada kongres tahun 1950, Maria Ullfah dipilih sebagai ketua sekretariat Kongres Wanita Indonesia.

Pada masa perjuangan ikatan yang kuat antara organisasi mutlak dibutuhkan untuk membantu perjuangan melawan Belanda, sedangkan pasca

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 114.

pengakuan kedaulatan ikatan yang semacam itu dirasa sudah tidak diperlukan lagi. Berbagai ideologi yang dibawa oleh setiap organisasi perempuan dizaman perang kemerdekaan harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan bersama untuk merdeka seutuhnya. Sehingga saat-saat seperti ini dirasa sudah waktunya bagi masing-masing organisasi untuk mengkonsolidasikan dirinya untuk mengadakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan latar belakang ideologinya masing-masing. Setiap organisasi perempuan kembali dapat memperjuangkan ideologi dan pemikiran organisasi masing-masing tanpa harus menahan diri untuk kepentingan bersama.

Pada kongres tahun 1950 tersebut Kowani sebagai badan tetap pemersatu organisasi-organisasi perempuan akhirnya dibubarkan. Pasca kongres tahun 1950 semua cabang Kowani ikut dihapuskan, selanjutnya Kongres Wanita Indonesia sebagai organisasi baru menganjurkan kepada organisasi lokal agar di tiap daerah dibentuk badan kerja sama organisasi perempuan yang merupakan gabungan organisasi lokal. Mengenai nama organisasi di setiap daerah diserahkan kepada masing-masing daerah dan tidak perlu diseragamkan dengan pusat. Sebagai organisasi baru, garis besar kebijakan Kongres Wanita Indonesia mengikuti prinsip dasar Pancasila.

Tujuan Kongres Wanita Indonesia adalah mencapai kemerdekaan yang absolut, realisasi dari hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai warga negara, dan keamanan internasional dan perdamaian dunia.<sup>83</sup> Melihat dari tujuan Kongres Wanita Indonesia dapat kita katakan bahwa tujuan kongres tidak lagi

---

<sup>83</sup> Stuers, Cora Vreede-de, *op.cit.*, hlm. 181.

untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang dimaksudkan adalah mempertahankan kemerdekaan. Tujuan kongres telah kembali kepada tujuan awal organisasi perempuan, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan. Realisasi dari tujuan tersebut ditunjukkan dalam tuntutan kongres kepada pemerintah, agar diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum perempuan, dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan dari Kementerian Agama agar diadakan keseimbangan antara anggota laki-laki dan perempuan dari segala bidang/ agama, dan kepada organisasi-organisasi perempuan dianjurkan untuk mempelajari kedudukan perempuan dalam perkawinan, baik menurut hukum adat maupun hukum agama.

Masalah mengenai Undang-Undang Perkawinan yang menjadi tujuan utama perjuangan organisasi perempuan, dalam tahun-tahun selanjutnya masih tetap menjadi tujuan pokok perjuangan organisasi perempuan. Kongres Wanita Indonesia yang diadakan di Bandung tanggal 22-25 Desember 1952 menghasilkan beberapa resolusi dan selanjutnya dikirim kepada pemerintah. Resolusi-resolusi tersebut adalah:<sup>84</sup>

1. Mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perkawinan.
2. Kaum perempuan diberi tempat pada pengadilan agama (terutama yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan perceraian).
3. Pejabat urusan perkawinan, talak, rujuk diberi pendidikan khusus.
4. Pembentukan sebuah panitia yang bertugas merencanakan sistem pendidikan bagi kaum perempuan.
5. Jumlah anggota perempuan dalam Dewan Penasehat Biro Tenaga Kerja Kementerian Perburuhan ditambah.
6. Dilakukannya pengawasan terhadap majalah, poster, iklan, serta lainnya yang bertentangan dengan kesusilaan ditindak lebih keras.

---

<sup>84</sup> Wieringa, Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 230-231.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan, maka dalam kongres tersebut Yayasan Seri Derma yang didirikan tahun 1928 dihidupkan kembali. Diharapkan dengan kembalinya Yayasan Seri Derma dapat membantu para pelajar perempuan untuk menuntut ilmu, di mana yayasan akan memberikan beasiswa dan membuka asrama-asrama bagi pelajar perempuan.

Pasca kongres tahun 1952, sebagai upaya membangkitkan semangat kaum perempuan Indonesia maka diselenggarakan Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 22 Desember 1953. Dalam acara tersebut diresmikan pula berdirinya Bank Koperasi Wanita, yaitu suatu koperasi Simpan Pinjam yang diperuntukkan bagi kaum perempuan Jakarta. Berdirinya Bank Koperasi Wanita tersebut diprakarsai oleh Maria Ullfah selaku ketua Kongres Wanita Indonesia, Ny. Said Suryodinoto, Ny. S. Herman, dan Ny. Titi Memet Tanumidjaja.

Kongres Wanita Indonesia yang ke-X selanjutnya diselenggarakan di Palembang pada tanggal 2-5 Maret 1955.<sup>85</sup> Dalam kongres tersebut masalah mengenai Undang-Undang Perkawinan kembali dibahas. Kongres menuntut kepada pemerintah agar segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang pokok dan khusus, agar masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dan kaum perempuan tidak menjadi korban dalam masalah tersebut. Kongres juga menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dalam kongres

---

<sup>85</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 121.

tersebut Maria Ullfah kembali terpilih menjadi ketua Sekretariat untuk masa jabatan tahun 1955 hingga tahun 1957. Pasca kongres tersebut pada Agustus 1957, kongres mengirimkan tiga wakilnya dalam acara Seminar Wanita Asia di Bangkok, Thailand. Seminar tersebut membahas tentang *Increased Participation of Asian Women in Publik Life*. Kongres tersebut merupakan kongres yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maria Ullfah bersama dengan Ny. Mr. Nani Soewondo dan drg. Ny Yetty Rizali Noor terpilih menjadi wakil Indonesia untuk menghadiri acara tersebut.

Kongres Wanita Indonesia selanjutnya diselenggarakan pada tanggal 28-30 November 1957 di Surabaya. Masalah mengenai Undang-Undang Perkawinan masih tetap dibahas dalam kongres tersebut. Kongres terus mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pernikahan yang terjadi di Indonesia. Pasca kongres tersebut pada pertengahan tahun 1958 Sekretariat Kongres Wanita Indonesia mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perdana Menteri untuk membicarakan rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah disampaikan. Diusulkan dua buah kompromi dari beberapa organisasi perempuan, yaitu Rancangan UUP yang bersifat peraturan umum dan rancangan UUP umat Islam.<sup>86</sup> Pengiriman surat tersebut diharapkan pemerintah segera merancang Undang-Undang Perkawinan yang merupakan pokok perjuangan kaum perempuan. Selain membahas tentang Undang-Undang Perkawinan, kongres

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

tahun 1957 kembali memilih Maria Ullfah sebagai ketua Sekretariat kongres untuk masa jabatan tahun 1957-1961.

Sebagai upaya menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, pada tanggal 3 Februari 1958 Kongres Wanita Indonesia mengirim delegasi ke Konferensi Wanita Asia Afrika yang diadakan di Srilangka, Colombo. Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 15-24 Februari 1958 dengan dihadiri wakil-wakil dari PBB. Delegasi Indonesia terdiri atas Ny. Mr. Maria Ullfah Santoso (ketua), Ny. dr. H. Subandrio, Ny. Mr. Nani Suwondo, Ny. Kartini K. Radjasa, Nn. Soehartini, Ny. K.A. Soejono Prawirabisma, Ny. S.K. Trimurty, Ny. Elias St. Pangeran (Badan Usaha).<sup>87</sup> Sebelum para delegasi berangkat ke Colombo, terlebih dahulu pada delegasi dibekali pesan dari rakyat Indonesia agar memperjuangkan masalah Irian Barat dalam konferensi tersebut.

Setibanya di Colombo, para delegasi mendapatkan kabar bahwa *Steering Committee* telah memutuskan agar masalah politik tidak dibahas dalam konferensi tersebut. Maria Ullfah yang mendengar kabar tersebut langsung bertemu dengan *steering committee* dan meyakinkan mereka agar para pemimpin delegasi diperkenankan mengucapkan apa saja dalam pidato pembukanya, tetapi untuk masalah politik tidak akan dibahas dalam konferensi. “Mereka semua sudah mempersiapkan pidato pembukanya. Apakah semua 40 pidato pembuka mau kita sensor lebih dahulu? Tak ada waktu bukan? Biarlah mereka bicara sepuas-puasnya, tetapi soal-soal politik yang mereka kemukakan tidak akan kita

---

<sup>87</sup> Nani Soewondo, *op.cit.*, hlm. 222.

masukkan dalam agenda,” kata Maria Ullfah kepada *steering committee*.<sup>88</sup> Akhirnya saran Maria Ullfah dapat diterima dan perwakilan negara yang akan menyampaikan permasalahannya dapat berbicara didepan konferensi, meskipun masalah tersebut tidak akan dibahas dalam acara konferensi.

Pada keesokan harinya dalam sidang yang dipimpin oleh Maria Ullfah, seorang wakil dari Turki datang dan marah-marah di konferensi. Perwakilan Turki tersebut menanyakan kepada panitia tentang pidato pembuka yang membahas masalah politik dari masing-masing negara. Maria Ullfah yang saat itu menjadi pimpinan konferensi menjelaskan bahwa pidato pembuka dari keempat puluh negara tidak akan dibahas dalam konferensi dan hal tersebut hanya disampaikan dalam pidato pembuka. Penjelasan yang disampaikan oleh Maria Ullfah berhasil mencairkan suasana yang mulai memanas. Melihat kejadian tersebut seorang perwakilan dari PBB yang bernama Adisheshah memberi selamat kepada Maria Ullfah dan berkata “Kalau bukan karena diplomasi Maria Ullfah, maka mungkin sekali konferensi ini sudah menjadi kacau”.

Keahlian Maria Ullfah dalam hal diplomasi tersebut mendapatkan respon yang baik dari PBB. Sekembalinya ke Indonesia, Maria Ullfah dihubungi oleh kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia yang bernama Rosenberg. Rosenberg menyampaikan tawaran kepada Maria Ullfah untuk bekerja sebagai pejabat tinggi dalam sekretariat PBB di New York. Mendengar tawaran tersebut Maria Ullfah merasa senang, tetapi ia menolak tawaran tersebut

---

<sup>88</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 118.

dengan halus. Bagi Maria Ullfah pekerjaannya di Indonesia masih terlalu banyak dan penting, serta sulit untuk ditinggalkan.

Kongres Wanita Indonesia adalah suatu badan gabungan dari berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Berbagai aliran dan ideologi organisasi diperjuangkan dalam kongres. Salah satu aliran yang ingin berkuasa di dalam kongres adalah golongan kiri yaitu golongan yang dekat dengan kaum komunis. Maria Ullfah yang menjadi ketua Sekretariat kongres berusaha agar kongres tidak dijadikan alat bagi kaum komunis untuk meraih kepentingan golongannya. Maria Ullfah berusaha menjaga keseimbangan di dalam tubuh kongres karena di dalam kongres terdapat berbagai macam organisasi perempuan dari segala aliran yang memperjuangkan kepentingan organisasinya masing-masing. Sebagai seorang ketua Sekretariat Maria Ullfah harus selalu bersifat netral. Secara pragmatis Maria Ullfah pandai mengemukakan sesuatu penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang setuju maupun yang tidak.<sup>89</sup> Penyelesaian yang ditawarkan oleh Maria Ullfah selalu mengarah kepada pendirian yang ia perjuangkan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan organisasi perempuan.

Pada tahun 1958 kongres mengadakan rapat untuk membahas masalah “Gerakan Massa” yang anggotanya terdiri dari perorangan dan organisasi perempuan.<sup>90</sup> Gerakan Massa tersebut dipelopori oleh Gerwani yang berafiliasi dengan PKI. Gerakan Massa dianggap berbahaya oleh kongres karena dapat menimbulkan perpecahan diantara organisasi perempuan, bahkan gerakan massa

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>90</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *loc.cit.*,

tersebut dapat membubarkan Kongres Wanita Indonesia. Gerwani dan Perwamu (Persatuan Wanita Murba) serta beberapa perorang masuk ke dalam Gerakan Massa, tetapi mereka tetap ikut di dalam Kongres Wanita Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagai usaha untuk merongrong kongres dari dalam.

Kongres yang mengetahui keikutsertaan Gerwani, Perwamu, dan beberapa orang tidak terima dengan sikap mereka. Sebagai seorang ketua Sekretariat kongres Maria Ullfah dengan tegas mengatakan kepada organisasi perempuan yang masuk ke dalam Gerakan Massa untuk memilih Kongres Wanita Indonesia atau Gerakan Massa. Maria Ullfah menyatakan kepada peserta rapat jika tidak puas dengan kerja kongres maka bicarakan di dalam Kongres Wanita Indonesia dan jika perlu maka ubah Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia, tetapi jangan pernah mendirikan badan gabungan di luar Kongres Wanita Indonesia. Ketegasan Maria Ullfah tersebut berbuah hasil, yaitu tidak ada organisasi yang keluar dari Kongres Wanita Indonesia dan setelah itu Gerakan Massa tidak terdengar lagi.

Maria Ullfah yang sejak kongres tahun 1950 terpilih menjadi ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia memiliki peranan penting dalam mempersatukan organisasi perempuan di Indonesia. Maria Ullfah merupakan ketua Sekretariat Kongres Wanita pada dasawarsa pertama sesudah Proklamasi yang dengan kecakapan diplomasinya menjadi salah seorang arsitek persatuan kaum perempuan.<sup>91</sup> Kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan, yaitu sebagai Direktur Kabinet Perdana Menteri sangat membantu perjuangannya dalam

---

<sup>91</sup> Wieringa, Saskia Eleonora, *op.cit.*, hlm. 229.

Kongres Wanita Indonesia. Maria Ullfah dapat dengan mudah melakukan komunikasi secara informal mengenai masalah-masalah kaum perempuan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan.

Selama retan waktu dari tahun 1950 hingga tahun 1961 Maria Ullfah menjabat sebagai ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dilahirkan pada masa kepemimpinannya. Kebijakan yang pertama adalah tentang hari Ibu yang disederajatkan dengan hari Kebangkitan Nasional.<sup>92</sup> Maria Ullfah yang menjabat sebagai direktur kabinet Perdana Menteri mengetahui bahwa terdapat usul dari Dewan Menteri untuk menetapkan hari-hari nasional bersejarah. Maria Ullfah mengusulkan kepada Dewan Menteri agar hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember disederajatkan dengan hari Sumpah Pemuda. Akhirnya usul tersebut disetujui oleh pemerintah dengan surat keputusan Presiden No. 316 tahun 1959.<sup>93</sup>

Kebijakan kedua yang dicapai Maria Ullfah pada saat menjabat sebagai Sekretaris Kongres Wanita Indonesia adalah gagasan untuk memberi kesempatan kepada kaum perempuan masuk dalam angkatan bersenjata, khususnya

---

<sup>92</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 116.

<sup>93</sup> Hari ibu pertama kali dicetuskan oleh Ibu Soetinah Soeparta dari Isteri Indonesia. Gagasan tersebut diusulkan pada saat Kongres Perempuan Indonesia III tahun 1938 oleh ibu Soenarjo Mangoenpoespita. Kongres selanjutnya sepakat bahwa hari Ibu diperingati pada tanggal 22 Desember yaitu hari yang bertepatan dengan Kongres Perempuan Indonesia I. Atas usul Kowani dibawah pimpinan Mr. Maria Ullfah, maka dengan Kepres No. 316 tahun 1959 pemerintah telah mengesahkan hari Ibu sebagai Hari Besar Nasional, bukan hari libur dan sama nilainya dengan hari Sumpah Pemuda, lihat S. Iman Soedijat, "Relevansi Semangat Hari Ibu dengan Gerakan Perempuan di Indonesia", dalam Fauzie Ridjal, dkk (edt.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 116-117.

pembentukan Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat).<sup>94</sup> Pada saat Maria Ullfah masih menjabat sebagai Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, ia menghadap Jenderal Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum Maria Ullfah bertemu Jenderal Nasution, masalah tentang Kowad telah dibahas dalam Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia tanggal 20 September 1959. Setelah mendengar ceramah dari dr. Soemarno mengenai Kowad, selanjutnya dibentuk Panitia Kowad yang terdiri dari delapan organisasi. Selanjutnya pendapat tersebut mendapat perhatian dari Pimpinan Angkatan Darat, yaitu Jenderal Nasution dan pada tanggal 22 Desember 1961 lahir Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Gagasan mengenai keikutsertaan perempuan dalam angkatan bersenjata sebenarnya telah dibahas pada masa revolusi fisik. R. Said Soekanto seorang Kepala Kepolisian Negara pertama di Indonesia mengusulkan kepada Kowani agar perempuan dapat diterima dalam kepolisian. Gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa bidang kepolisian yang lebih baik ditangani kaum perempuan, seperti masalah kriminalitas di kalangan anak-anak dan kaum perempuan. Gagasan tersebut pertamakali dilaksanakan di Bukittinggi karena saat itu ibu kota negara sedang diserbu tentara Belanda. Kesuksesan perempuan dalam kepolisian menjadi latarbelakang Kongres Wanita untuk memperjuangkan agar dalam angkatan-angkatan bersenjata lainnya peran perempuan diikutsertakan. Perjuangan Kongres Wanita Indonesia agar perempuan dapat ikut serta dalam angkatan bersenjata akhirnya berhasil, seluruh angkatan bersenjata baik itu

---

<sup>94</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 114.

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah memiliki anggota dari kaum perempuan.

Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat) pada awal pembentukannya pernah menimbulkan salah tafsir bagi sebagian orang, khususnya bagi isteri-isteri perwira tinggi. Mencontoh pada kebiasaan Angkatan Bersenjata, dimana seorang perwira tinggi selalu didampingi oleh seorang perwira muda sebagai ajudan maka hal tersebut pun diterapkan kepada isteri dari perwira tinggi. Setiap isteri dari perwira tinggi disediakan ajudan, yaitu seorang anggota Angkatan Bersenjata Kowad. Tugas sebagai ajudan tersebut disalah artikan oleh para isteri perwira tinggi, para Kowad yang menjadi ajudan harus ikut berbelanja, menjemput anak-anak dari sekolah, dan melakukan tugas pengasuh lainnya. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Maria Ullfah selaku ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia. Maria Ullfah yang mendapat laporan tersebut langsung memberi arahan kepada pimpinan Angkatan Bersenjata bahwa Kowad mendapat pendidikan dan pelatihan kemiliteran bukan untuk menjalankan tugas sebagai pengasuh anak dan pendamping ibu perwira tinggi berbelanja tetapi untuk mengamankan para ibu-ibu perwira tinggi.

Sebagai seorang ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia merangkap sebagai Direktur Kabinet RI satu hal yang disesalkan Maria Ullfah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian kesempatan kepada isteri kedua dan seterusnya untuk ikut mendapatkan pensiun janda, bila suaminya seorang pegawai negeri sudah meninggal.<sup>95</sup> Pegawai negeri

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

dapat menunjuk seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak mendapatkan pensiunan. Jika terdapat lebih dari satu isteri, maka pensiun janda adalah sebesar *dua kali pokok pensiun* yang dibagikan rata antara isteri-isteri tersebut. Jadi apabila terdapat empat orang isteri, maka masing-masing mendapatkan setengah dari pokok pensiun seorang janda. Penyesalan yang dirasakan Maria Ullfah, ia sampaikan dalam biografinya yang ditulis oleh Gadis Rasid. Berikut adalah kata penyesalan Maria Ullfah yang disampaikan dalam biografinya:

“Sampai sekarang yang tidak mengerti mengapa soal ini lolos dari perhatian saya, ketika saya bertugas sebagai Direktur Kabinet dan Abdul Wahab S.H. sebagai Sekretaris Dewan Menteri. Mungkin pada waktu itu saya sedang sibuk dengan soal-soal lain sehingga tidak sempat membaca usul-usul yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet yang dipersiapkan oleh Abdul Wahab S.H. sebagai sekretaris Dewan Menteri”.<sup>96</sup>

Dikeluarkannya peraturan tersebut berarti pemerintah tidak hanya *mengakui* bahwa seorang pegawai diperbolehkan mengambil isteri kedua, tetapi seorang pegawai negeri disarankan untuk mengambil lebih dari seorang isteri. Padahal dalam Angkatan Bersenjata, organisasi gerakan perempuan telah berhasil memperjuangkan hak seorang isteri. Seorang anggota Angkatan Bersenjata tidak diperbolehkan mengambil isteri kedua tanpa izin Komandannya dan dalam prakteknya izin tersebut sangat sulit didapatkan.

Peraturan Pemerintah tersebut mendapat kecaman keras dari salah satu organisasi perempuan anggota Kongres Wanita Indonesia, yaitu Perwari. Perwari adalah salah satu organisasi perempuan di Indonesia yang sangat menentang poligami. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap Perwari ketika Presiden Soekarno

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

mengambil isteri kedua yaitu Ny. Hartini Soewondo dari Salatiga. Perwari yang memprotes pernikahan kedua Presiden Soekarno melakukan aksi demonstrasi yang mengakibatkan ibu Fatmawati keluar dari istana negara. Akibat kejadian tersebut Presiden Soekarno mulai membenci gerakan perempuan. Ibu Fatmawati yang bertemu dengan beberapa pemimpin organisasi perempuan menyampaikan keluhannya, “Sampai dimana perjuangan kalian? Mana hasilnya? Mengapa pergerakan wanita tidak lebih giat memperjuangkan nasib kaumnya?”.<sup>97</sup> Sikap Ibu Fatmawati tersebut sangat berbeda dengan sikapnya sebelum Presiden Soekarno menikah kembali. Pada awalnya Fatmawati menentang usaha organisasi perempuan yang menuntut agar pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perkawinan, tetapi ketika poligami telah dialaminya maka ia berbalik mendukung perjuangan kaum perempuan.

Sikap Kongres Wanita Indonesia terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 dan masalah Hartini sangat berlainan dengan Perwari. Kongres tidak banyak meributkan permasalahan tersebut, hal ini karena sikap kongres yang lebih menjaga persatuan kongres yang terdiri atas berbagai macam aliran. Masalah poligami tidak akan pernah mencapai suara bulat karena kongres merupakan gabungan dari berbagai organisasi perempuan yang memiliki pendirian yang berbeda-beda pula. Maria Ulfah yang masih menjabat sebagai ketua Sekretariat kongres oleh segolongan organisasi dianggap telah luntur dalam perjuangannya untuk memperoleh kedudukan yang lebih kuat bagi kaum perempuan dalam hal

---

<sup>97</sup> Nani Suwondo, “Wanita dan Masalah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu setelah Katini 1904-1984*. (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984), hlm. 113.

hukum keluarga. Sikap Maria Ullfah yang cenderung tidak radikal membuatnya dianggap tidak konsisten. Sikap Maria Ullfah tersebut bukan karena ia tidak lagi memperjuangkan cita-citanya dulu, tetapi dalam kedudukannya sebagai ketua Sekretariat kongres, Maria Ullfah harus bersikap netral demi menjaga kekompakan antara semua golongan perempuan Indonesia.

Selain aktif dalam pemerintahan dan organisasi perempuan, Maria Ullfah aktif pula dalam dunia perfilman. Sejak tahun 1950 hingga tahun 1961 Maria Ullfah tercatat sebagai Ketua Panitia Sensor Film Indonesia.<sup>98</sup> Jabatan tersebut sebenarnya hanya tiga tahun, tetapi berkali-kali Maria Ullfah diangkat kembali yaitu pada tahun 1953 dan tahun 1956. Seharusnya masa jabatan Maria Ullfah berakhir pada tahun 1959, tetapi karena Ny. Utami Suryadarma yang oleh orang-orang komunis dicalonkan sebagai ketua menolak tawaran tersebut. Akhirnya jabatan ketua tetap dijabat Maria Ullfah hingga tahun 1961.

Sejak Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda karena masalah Irian Barat, banyak masyarakat khususnya kaum muda yang melakukan aksi menentang imperialisme Amerika Serikat, termasuk film-film Amerika. Sejak tahun 1950-an film-film *Hollywood* lebih banyak diminati oleh masyarakat dunia. Golongan kiri yang sangat anti terhadap Barat mencela film-film Amerika yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan dapat merusak moral. Sebuah film Amerika yang berjudul *Rock Around the Clock* pada tahun 1957 diloloskan oleh Panitia sensor. Film tersebut mengisahkan tentang dansa *rock* yang mulai menjadi

---

<sup>98</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 130.

mode saat itu. Golongan kiri yang kecewa dengan sikap panitia sensor mengkritik hal tersebut.

Kaum ibu-ibu yang tergabung dalam Kongres menyatakan keinginannya untuk melihat film tersebut, karena ingin mengetahui apakah benar film tersebut dapat merusak moral bangsa. Maria Ullfah yang masih menjabat sebagai ketua Sekretariat kongres mengabulkan keinginan ibu-ibu kongres dan mengadakan pemutaran film tersebut di ruangan “pre-view” dari gabungan perusahaan film Amerika. Pada saat acara akan dimulai, Maria Ullfah diberitahu oleh seorang pegawai perusahaan Colombia bahwa di luar ada dua orang pemuda yang ingin bertemu dengan Maria Ullfah. Maria Ullfah langsung keluar ruangan dan bertemu dengan dua orang pemuda tersebut. Maria Ullfah yang keluar ruangan langsung dipegang lengannya dan dipaksa ikut kedua pemuda tersebut dengan menggunakan oplet yang telah menunggu di pinggir jalan. Ny. Gadis Susilo yang mengetahui kejadian tersebut ikut masuk ke dalam oplet. Ini merupakan kali kedua Maria Ullfah mengalami tindak penculikan, setelah sebelumnya pada masa Kabinet Sjahrir II Maria Ullfah ikut diculik bersama Sjahrir di Solo.

Maria Ullfah dan Ny. Gadis Susilo dibawa ke sebuah rumah di daerah Menteng, di jalan Waringin Pojok jalan Tanjung.<sup>99</sup> Oplet yang membawa Maria Ullfah berhenti di sebuah pavilyun rumah yang bernama “Markas Besar Pemuda Pembela Konsepsi Bung Karno”. Maria Ullfah sadar bahwa ia sekarang berada di tempat berkumpulnya Pemuda Rakyat (organisasi pemuda komunis) dan pemuda Marhaenis (organisasi pemuda PNI). Seorang pemuda telah menunggu Maria

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

Ullfah di dalam rumah dan ketika Maria Ullfah masuk ia langsung berbicara serta meminta pertanggung jawabannya yang meloloskan film *Rock Around the Clock*. Maria Ullfah dengan tenang menjelaskan bahwa film tersebut telah dinilai oleh suatu panitia kecil yang dipimpin oleh Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat. Maria Ullfah kemudian menjelaskan tata kerja Panitia Sensor Film, di mana setiap film akan diperiksa oleh sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh seseorang yang ahli dibidang yang berhubungan dengan isi film tersebut. Menurut Maria Ullfah film *Rock Around the Clock* adalah film remaja, maka pimpinan panitia sensor dipilih adalah dari Kepala Pendidikan Masyarakat.

Maria Ullfah tetap pada pendiriannya bahwa film tersebut layak untuk ditayangkan, jika menyangkut masalah pornografi maka Maria Ullfah balik bertanya kepada pemuda tersebut tentang acara sirkus dari Rusia yang diadakan di Istana presiden. Maria Ullfah menjelaskan bahwa pakain yang digunakan oleh pemain akrobat perempuan sangat minim, “seperti cawat saja” kata Maria Ullfah menegaskan. Pemuda rakyat tersebut masih tetap dengan pendiriannya dan mengatakan kepada Maria Ullfah bahwa Panitia Sensor harus memperhatikan suara pemuda. Perdebatan diantara keduanya berakhir ketika ada telepon untuk pemuda tersebut. Terpon tersebut berasal dari Sudiro, seorang tokoh PNI yang pernah menjabat sebagai walikota Jakarta. “Ya pak, mereka sudah datang,” kata pemuda rakyat menjawab telfon tersebut. Setelah percakapan telepon berakhir Maria Ullfah langsung diperbolehkan pulang.

Begitu Maria Ullfah dan Ny. Gadis Susilo keluar rumah, mereka melihat kendaraan jeep dari kepolisian yang datang dan berjaga-jaga di dekat rumah

tersebut. “Ibu baik-baik saja? Mari saya antarkan pulang,” kata perwira polisi Sempu Mulyono kepada Maria Ullfah. sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pemuda rakyat, maka Maria Ullfah mengajukan gugatan atas peristiwa penculikannya. Selain itu, peristiwa penculikan Maria Ullfah yang terjadi pada tanggal 26 Februari 1957 tersebut menimbulkan reaksi dari Gerakan Wanita Sosialis (GWS) yang mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno.<sup>100</sup> Ny. S.W. Sjahrir yang menjadi ketua GWS mengirimkan surat tersebut pada tanggal 8 Maret 1957, dalam surat tersebut GWS menuntut kepada pihak yang berwajib untuk mengusut kasus penculikan yang dialami Maria Ullfah. Bagi GWS peristiwa tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin main hakim sendiri. Selain itu, menurut GWS penculikan Maria Ullfah merupakan wujud penghinaan bagi kaum ibu pada umumnya dan terhadap seorang pemimpin perempuan serta tokoh nasional yang selama umurnya berjuang demi bangsa.

Beberapa bulan kemudian masalah penculikan Maria Ullfah di hadapkan ke pengadilan dan pemuda rakyat yang menjadi pelaku penculikan hanya mendapatkan hukuman ringan. Maria Ullfah memahami hal tersebut dan tahu bahwa Ny. C. Suparni Mulyono S.H yang menjadi hakim dapat menerima pembelaan pemuda rakyat yang ingin menyelamatkan masyarakat. Perbuatan Pemuda Pembela Konsepsi Bung Karno yang menentang masuknya film-film Amerika sangat berlainan dengan Presiden Soekarno yang sangat senang dengan

---

<sup>100</sup> ANRI, Kabinet Presiden RI, No. 2044, *Surat Pernyataan Gerakan Wanita Sosialis*.

film-film Barat, bahkan setiap satu minggu sekali Maria Ulfah diminta untuk mengusahakan satu film Amerika yang belum disensor untuk diputar dalam Istana Presiden Soekarno dan tamu-tamunya.

Perkembangan Kongres Wanita Indonesia dari tahun 1960-1965 sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara.<sup>101</sup> Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah mengubah arah pemerintahan Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan atas negara. PKI sebagai salah satu partai politik yang ingin memperkuat kedudukan politiknya di Indonesia mulai mendekati Presiden Soekarno. PKI berusaha meyakinkan Presiden Soekarno tentang kedudukan presiden yang lemah tanpa adanya dukungan dari PKI. PKI yang berhasil meyakinkan Presiden Soekarno mulai mendapatkan kedudukan dalam pemerintah, sehingga PKI bersama ormas-ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror kepada lawan politiknya.

Pengaruh PKI tidak hanya berhenti pada dunia politik, PKI yang berafiliasi dengan Gerwani mulai menciptakan ketegangan di dalam kongres. Sejak Gerwani berhasil duduk dalam pimpinan Kongres Wanita Indonesia tahun 1957 suasana “ketegangan” dalam gerakan perempuan mulai terjadi.<sup>102</sup> Melalui Gerwani PKI mulai merorong Kongres Wanita Indonesia dari dalam. Pengaruh Gerwani menjadi sangat kuat sejak struktur Pimpinan Kongres Wanita Indonesia diubah dalam kongres tahun 1961. Kongres tersebut diselenggarakan di Jakarta pada

---

<sup>101</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *op.cit.*, hlm. 284.

<sup>102</sup> Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *op.cit.*, hlm. 140.

tanggal 6-9 Februari 1961. Kongres tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk mengubah struktur pimpinan kongres dari Sekretariat sebagai Badan Pelaksana Putusan Kongres dan Majelis Permusyawaratan, menjadi Dewan Pimpinan Kongres yang mempunyai kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>103</sup> Dewan Pimpinan kongres terdiri dari Sembilan orang yang dipilih oleh Kongres sekaligus. Selanjutnya dari Sembilan orang Dewan Pimpinan akan diangkat satu orang untuk menjadi Ketua Koordinator. Kongres memutuskan untuk memilih dr. Ny. Hurustianti Soebandrio sebagai Ketua Koordinator Dewan Kongres. Ny. Hurustianti Soebandrio adalah isteri dari menteri luar negeri, ia mewakili organisasi Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI). Selain itu, terpilih pula Ny. Moedigdo seorang wakil dari Gerwani, ia adalah mertua dari D.N. Aidit yang seorang tokoh dalam PKI.

Perubahan struktur pimpinan kongres dilatarbelakangi oleh pidato pembukaan Kongres yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Pada pidato pembukaan Kongres Wanita Indonesia tahun 1961, Presiden Soekarno menyebut Kongres Wanita Indonesia sebagai *Ladies Movement* yaitu gerakan perempuan yang lamban.<sup>104</sup> Sebagai seorang ketua Kongres Maria Ullfah menjelaskan kepada Presiden Soekarno bahwa bentuk organisasi Kongres Wanita Indonesia telah diputuskan oleh seluruh anggota kongres pada tahun 1950 di Jakarta tepatnya setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Keputusan tersebut dikarenakan organisasi-organisasi perempuan yang ada ingin mengkonsolidasikan

---

<sup>103</sup> Maria Muharam Wiranatakusuma, *loc.cit.*,

<sup>104</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 121.

organisasinya masing-masing. Sejak peristiwa tersebut hubungan Maria Ullfah dengan Presiden Soekarno menjadi sedikit merenggang. Meskipun Maria Ullfah masih ikut dalam Dewan Pimpinan, tetapi secara struktural kekuasaan kongres mulai beralih kepada Gerwani.

Kedudukan PKI dalam pemerintahan semakin lama semakin kuat, bahkan dua partai yang paling keras menentang pengaruh komunis dapat disingkirkan oleh PKI dengan mudah. Sejak bulan Agustus 1960 Masyumi dan PSI dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Organisasi Muslimat yang merupakan bagian dari Masyumi dengan sendirinya dikeluarkan dalam kongres. Meskipun organisasi Muslimat berubah nama menjadi Wanita Islam yang berdiri sendiri dan tidak lagi terabung dalam Masyumi, tetapi Wanita Islam tetap tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia.

Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1964 kembali menyelenggarakan kongres yang berlangsung di Jakarta tanggal 24-28 Juli 1964. Kongres dibuka dengan pidato dari Presiden Soekarno dan selanjutnya pidato tersebut digunakan sebagai pokok program perjuangan Kongres Wanita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno memberi peringatan kepada kaum perempuan dengan kata-kata, “Hati-hati terhadap partai terlarang. Mereka gremet-gremet mau mencoba masuk kembali”. Peserta kongres memahami bahwa orang yang dimaksud dalam pidato tersebut adalah Maria Ullfah, ia merupakan satu-satunya peserta kongres yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Maria Ullfah yang memahami maksud pidato presiden meminta kepada Sekretaris pribadi presiden yang bernama Mualiff Nasution untuk bertemu

presiden secara informal. Dalam pertemuan tersebut Maria Ulfah meminta penjelasan presiden mengenai pidato tersebut. Menurut Presiden Soekarno pidatonya tersebut bersifat umum dan tidak ada hubungannya dengan Maria Ulfah. Maria Ulfah yang tidak menerima pernyataan Presiden Soekarno tetap tinggal dan terus meminta penjelasan presiden. Meskipun tidak mau mengakui kesalahannya secara terbuka, tetapi presiden menyadari apa yang dimaksud oleh Maria Ulfah. Hal tersebut terbukti dengan ucapan Dr. Roeslan Abdulgani dalam siaran Radio Republik Indonesia beberapa hari kemudian yang mengulas tentang perjuangan dan peranan Maria Ulfah demi bangsa Indonesia.

Sejak tahun 1964 Maria Ulfah tidak lagi ikut dalam Pimpinan Dewan Kongres Wanita Indonesia. Kedudukannya sebagai salah satu pemimpin perempuan mulai tergeser seiring dengan berkembangnya komunis. Maria Ulfah yang dianggap sebagai bagian dari orang sosialis disingirkan dari kedudukannya sebagai salah satu anggota Pimpinan Dewan. Sejak Maria Ulfah tidak menjabat sebagai Pimpinan Dewan arah kongres mulai berubah, cita-cita pokok organisasi perempuan yang pada awalnya untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan menjadi kabur. Kongres yang sejak awal berusaha memperjuangkan masalah Undang-Undang Perkawinan, sejak tahun 1964 tidak lagi membahas masalah tersebut. Perkembangan kongres selanjutnya lebih mengikuti arah pandang Presiden Soekarno yang cenderung ke kiri.

#### **D. Maria Ulfah dalam Dewan Pertimbangan Agung dan Kegiatan Sosial**

Arah politik Indonesia pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mulai mengarah ke arah kiri atau komunis. Hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika

Serikat yang sempat terjalin pasca kasus Irian Barat, menjadi memburuk seiring dengan adanya konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Blok Barat, dimana Amerika Serikat adalah bagian dari negara Blok Barat (Inggris, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura).<sup>105</sup> Konfrontasi tersebut berakibat pada munculnya demonstrasi anti imperialisme dan neo-kolonialisme yang mewarnai ibukota. Munculnya demonstrasi berdampak pada banyaknya orang Inggris dan Amerika Serikat yang keluar dari Jakarta, bahkan banyak dari lembaga-lembaga milik Amerika Serikat yang ditutup.

Konfrontasi terhadap Malaysia mengakibatkan negara mengalami defisit.<sup>106</sup> Kondisi tersebut diperparah dengan adanya proyek-proyek mandataris atau yang dikenal dengan proyek mercusuar, seperti *Games of the New Emerging Forces (Ganefo)* dan *Conference of the New Emerging Forces (Conefo)*. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan proyek pembangunan gedung-gedung megah, contohnya Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Hotel Samedera Beach, Hotel Ambarukmo (Yogyakarta), Hotel Bali Beach (Denpasar), Masjid Istiqlal, Tugu Monas dan lain-lainnya. Proyek-proyek tersebut merupakan pembuktian Presiden Soekarno kepada dunia Internasional bahwa sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mampu tampil di dunia internasional melalui karya-karya arsitektur yang dalam pengerjaannya tidak mudah.

---

<sup>105</sup> Nina H. Lubis, *G30S Sebelum dan Sesudah*. (Bandung: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat), 2012, hlm. 8.

<sup>106</sup> *Ibid.*,

Proyek pembangunan yang digalakkan oleh Presiden Soekarno memaksa pemerintah untuk mengeluarkan uang yang sangat besar untuk kepentingan pembangunan. Pengeluaran negara yang setiap tahunnya semakin meningkat mengakibatkan terjadinya peningkatan inflasi sebesar 650%. Selain itu, inflasi yang terjadi juga berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Tercatat harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan paling tinggi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200% hingga 300% dari harga tahun 1964.<sup>107</sup> Keadaan tersebut juga disebabkan oleh lemahnya nilai ekspor dan terjadinya pembatasan impor karena negara mengalami kekurangan devisa.

Disisi lain PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dalam Pemilihan Umum tahun 1955 mengalami kenaikan suara<sup>108</sup>, mulai meningkatkan peranannya dalam pemerintahan. PKI mulai menyusupkan anggotanya dalam beberapa organisasi, seperti organisasi perempuan. Puncak kekuasaan PKI adalah ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965, yang selanjutnya dikenal dengan nama G30S (Gerakan 30 September) atau Gestapu. Peristiwa tersebut merupakan sebuah usaha kudeta yang dilakukan oleh pasukan Gerakan 30 September, tetapi dalam perkembangannya masyarakat percaya bahwa dalang dari peristiwa tersebut adalah PKI.

---

<sup>107</sup> Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 432.

<sup>108</sup> PKI berhasil masuk kedalam empat besar pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. PKI menempati urutan keempat setelah Partai Nahdatul Ulama (NU) dengan perolehan suara sebesar 6.955.141 suara atau 16,4%, lihat Nina H. Lubis, *op.cit.*, hlm. 41.

Menanggapi peristiwa tersebut pemerintah langsung melancarkan operasi penumpasan G30S pada tanggal 1 Oktober 1965. Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto yang telah mengetahui peristiwa tersebut atas persetujuan perwira tinggi yang ada di Kostrad mengambilalih pimpinan Angkatan Darat. Pangkostrad Mayjen Soeharto yang bergerak cepat dalam hari itu juga berhasil menguasai Jakarta tanpa jatuh korban. PKI dan ormas-ormasnya selanjutnya dinyatakan sebagai partai terlarang dan orang-orang yang beraitan dengan PKI ditumpas oleh pemerintah. Baik keluarga atau keturunan dari PKI dalam masa Orde Baru keberadaannya dikucilkan dan dilarang masuk dalam pemerintahan. Hingga saat ini peristiwa G30S adalah suatu peristiwa yang misterius, karena dalang yang sebenarnya dalam peristiwa tersebut belum jelas adanya.

Nama Soeharto menjadi naik karena berhasil menumpas pemberontakan PKI, terlebih dengan adanya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Supersemar. Soeharto dengan menggunakan Supersemar selanjutnya berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) dalam rapat MPRS tahun 1966 akhirnya ditolak dan bulan Maret 1967 Presiden Soekarno dicabut kekuasaannya sebagai presiden. Soeharto diangkat menjadi Presiden Indonesia ke II pada bulan Maret 1968.<sup>109</sup> Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto kembali membuka Indonesia bagi negara-negara dunia Barat.

---

<sup>109</sup> Rosihan Anwar,*op.cit.*, hlm. 195.

Orde Baru juga merupakan suatu masa yang baru bagi kehidupan rumah tangga Maria Ullfah. Soebadio Sastrosatomo yang telah resmi menjadi suami Maria Ullfah sejak 10 Januari 1964, akhirnya dibebaskan sebagai tahanan politik Soekarno pada tanggal 5 Mei 1966.<sup>110</sup> Keduanya menetap di rumah Maria Ullfah, yaitu di Jalan Guntur nomor 49 Jakarta Selatan. Dari pernikahannya yang pertama dan kedua Maria Ullfah tidak memiliki anak, ia hanya memiliki satu orang anak angkat yang bernama Darmawan Wioreno.

*Friedrich Ebert Stiftung* sebuah yayasan dari Jerman Barat yang bekerja untuk meningkatkan taraf hidup kaum buruh mulai mendekati Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo. Keduanya dimintai pertimbangan dan nasehat tentang bagaimana cara memperluas kegiatannya di Indonesia. Atas nasehat Maria Ullfah dan Soebadio, akhirnya yayasan *Friedrich Ebert Stiftung* dapat memperluas kegiatannya di Indonesia dan mendirikan sebuah yayasan Tenaga Kerja Indonesia di jalan Gatot Subroto. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo ikut dalam meletakkan dasar untuk mendirikan sebuah yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya, Maria Ullfah diangkat sebagai salah satu anggota Pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1968. Maria Ullfah dan Soebadio yang dianggap sebagai orang sosialis oleh *Friedrich Ebert Stiftung* diundang ke Jerman Barat. Keduanya diundang secara pribadi oleh yayasan *Friedrich Ebert Stiftung* dan Partai Sosialis Jerman.

Maria Ullfah dalam bulan Februari 1968 diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Maria Ullfah merupakan perempuan pertama yang

---

<sup>110</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 142.

menjadi anggota DPA.<sup>111</sup> Jabatan tersebut merupakan jabatannya yang terakhir dalam ikatan pemerintah setelah Maria Ullfah dengan resmi dipensiunkan pada tahun 1967. Jabatan Maria Ullfah sebagai anggota DPA dijabatnya hingga tahun 1973. DPA merupakan lembaga negara yang bertugas memberi nasehat kepada eksekutif, dalam hal ini adalah presiden. Sebagai anggota DPA Maria Ullfah diundang oleh Pemerintah Australia untuk mengadakan kunjungan ke Australia pada tahun 1972. Sekembalinya dari Australia, Maria Ullfah singgah di Singapura dan berkunjung ke Markas Besar PAP (*People's Action Party*). Di Singapura Maria Ullfah meninjau berbagai kegiatan-kegiatan dari partai tersebut.

Antara tahun 1973 dan 1974 merupakan tahun yang bersejarah bagi Maria Ullfah. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama H. Mukti Ali dan Menteri Kehakiman Oemar Seno Adjie menyampaikan jawaban atas pandangan umum para anggota DPR mengenai RUU tentang perkawinan pada tanggal 27 September 1973 di Gedung DPR, Jakarta.<sup>112</sup> Pada saat Menteri Agama H. Mukti Ali memberikan penjelasan pemerintah atas RUU tentang perkawinan, tiba-tiba terdengar teriakan dari pemuda-pemudi golongan Islam yang menyatakan ketidaksetujuan mengenai RUU tersebut. Penyerbuan tersebut berakibat pada penundaan pembacaan jawaban atas pandangan umum para anggota DPR mengenai RUU tentang perkawinan. Selanjutnya DPR secara intern mengadakan rapat gabungan Komisi III dan IX DPR pada tanggal 6 Desember 1973. Setelah

---

<sup>111</sup> *Ibid.*,

<sup>112</sup> Maria Ullfah Subadio, *Ibid.*, hlm. 19.

melakukan peninjauan ulang dan beberapa perubahan, maka pada tanggal 22 Desember 1973 DPR mengesahkan RUU tentang perkawinan tepat pada Hari Ibu.

RUU tentang perkawinan selanjutnya diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>113</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut belum berlaku secara efektif dan baru mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 setelah keluarnya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975. Akhirnya apa yang diperjuangkan dan dicita-citakan Maria Ullfah sejak kembali ke tanah air pada tahun 1933 telah tercapai. Sebuah Undang-Undang Perkawinan yang dapat menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan telah terbentuk. Dalam pencapaian tersebut Maria Ullfah dengan rendah hati menyatakan bahwa ia tidak terlalu banyak berperan dalam tercapainya Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974. Meskipun demikian dalam hal ini kita patut mengapresiasi peran Maria Ullfah sebagai peletak dasar penanaman kesadaran dikalangan kaum perempuan tentang pentingnya Undang-Undang Perkawinan. Maria Ullfah telah berhasil membuka mata masyarakat terhadap banyaknya ketidak-adilan yang terdapat pada pelaksanaan kaidah-kaidah agama yang sering disalah tafsirkan.

Orde Baru sebagai suatu zaman baru yang dapat memulihkan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama pada kenyataannya membawa dampak yang kurang baik bagi rakyat Indonesia. Dibukanya Indonesia bagi investor asing membawa dampak buruk bagi kelangsungan perekonomian rakyat. Kasus korupsi dan salah urus kebijakan yang menguntungkan investor asing merupakan ciri khas

---

<sup>113</sup> Gadis Rasid, *op.cit.*, hlm. 168.

pemerintahan Orde Baru. Kebijakan Soeharto tersebut mendapat kecaman keras dari masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Puncaknya adalah peristiwa Malari 1974, dimana para mahasiswa dan kaum intelektual lainnya dengan *santer* mengecam peranan dominan Jepang dalam perdagangan ekspor dan impor di Indonesia.<sup>114</sup> Ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Jakarta pada bulan Januari 1974 para mahasiswa mengadakan demonstrasi anti Jepang. Demonstrasi berjalan dengan ricuh dan berakibat pada pembakaran Pasar Senen. Akibat demonstrasi tersebut banyak dari pemimpin-pemimpin mahasiswa dan tokoh politik ditangkap, termasuk Soebadio Sastrosatomo.

Soebadio Sastrosatomo dicurigai melakukan aksi penghasutan kepada para mahasiswa agar melakukan aksi demonstrasi. Atas tuduhan tersebut akhirnya Soebadio Sastrosatomo ditahan oleh pemerintah dan untuk kedua kalinya ia menjadi tahanan. Soebadio ditahan selama lebih dari dua tahun, atau tepatnya selama delapan ratus delapan hari. Sama halnya dengan penahanan Soebadio pada era Soekarno, ia akhirnya dibebaskan tanpa melewati jalur persidangan dan artinya selama menjalani masa tahanan ia tidak pernah mendapatkan hukuman resmi.

Maria Ullfah dan Soebadio mendapatkan undangan dari Pemerintahan Belanda untuk menghandiri upacara pembukaan *Staten Generaal* pada bulan September 1976. Upacara tersebut dibuka dengan *troonrede* atau pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ratu Juliana. Selain menghadiri upacara tersebut selama di Belanda Maria Ullfah diberi kesempatan untuk mempelajari

---

<sup>114</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 198.

berbagai kegiatan perempuan di negeri Belanda, seperti *Nederlandse Vrouwenraad*, *Emancipatie Commissie*, dan lembaga Ombud. Maria Ullfah juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kementerian CRM (*Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werek*) Dr. Hendriks. Pertemuan tersebut menjadi jalan bagi organisasi perempuan Indonesia di dunia internasional, karena setelah pertemuan tersebut setiap tahun pemerintah Belanda selalu mengundang berbagai organisasi perempuan untuk berkunjung ke Belanda.

Pada tahun 1978, Maria Ullfah mendapatkan undangan dari sahabatnya yang bernama Dr. Firnberg untuk menghadiri seminar yang diadakan di Linz (dekat Wina). Seminar tersebut membahas tentang sejarah pergerakan perempuan di Eropa sampai dengan Perang Dunia II dan sebagai pembicaranya adalah Dr. Hertha Firnberg, seorang menteri perempuan Austria. Maria Ullfah dan Soebadio Sastrosatomo selanjutnya pergi menunaikan ibadah haji pada tahun 1979. Setahun setelah melaksanakan ibadah haji Maria Ullfah dan Soebadio melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanannya kali ini hanya bersifat pribadi dan sebagai hiburan. Maria Ullfah dan Soebadio melakukan perjalanan ke Tokyo, Jepang untuk menemui Soejatmoko, mantan Duta Besar RI di Amerika Serikat dan baru diangkat menjadi Rektor United Nations University. Selain untuk menemui kawan lamanya, Maria Ullfah juga pergi ke Kyoto untuk bertemu dengan Prof. Kenji Tsuchiya seorang ahli tentang Indonesia pada Universitas Kyoto. Sekembalinya dari Jepang, Maria Ullfah singgah di Taipeh dan Hongkong dan diminta untuk memberikan ceramah tentang Undang-Undang Perkawinan.

Memasuki masa senja, Maria Ullfah tetap aktif melakukan berbagai kegiatan dalam masyarakat. Maria Ullfah tercatat masih aktif menjadi anggota pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam yayasan tersebut Maria Ullfah mengkhususkan diri menangani masalah yang menyangkut kedudukan dan hak-hak tenaga kerja wanita. Selain itu, Maria Ullfah juga aktif dalam bidang perkoperasian. Tercatat sejak tahun 1977, Maria Ullfah menjadi Ketua III dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang tugas khususnya adalah dibidang perundang-undangan, mempelajari dan mencari peraturan dan perundangan yang mendiskriminasikan koperasi atau menghambat perkembangan koperasi. Selama Maria Ullfah aktif dalam perkoperasian, usaha koperasi dikalangan perempuan mendapatkan perhatian yang khusus. Hal tersebut ditujukan agar kaum perempuan aktif dalam mengembangkan kemandirian diri dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Masalah sosial pun tidak luput dari perhatian Maria Ullfah, ia aktif dalam bidang sosial dengan menjadi Ketua Yayasan Rukun Isteri. Yayasan tersebut fokus dalam mengurus panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Putera Setia di Gang Sentiong, Jakarta.

Memasuki tahun 1981 Maria Ullfah genap berusia tujuh puluh tahun, sebuah usia yang tidak muda lagi. Atas inisiatif beberapa organisasi masyarakat hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 18 Agustus diperingati dengan suatu pertemuan di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Perayaan ulang tahun ke tujuh puluh Maria Ullfah berlangsung dengan sederhana tetapi tetap meriah. Selain keluarga dekat dan sahabat Maria Ullfah, hadir pula perwakilan dari beberapa organisasi yang pernah diikuti oleh Maria Ullfah, seperti perwakilan

Kongres Wanita Indonesia, Korps Wanita dari berbagai cabang Angkatan Bersenjata, dan insan perfilman Indonesia. Diusianya yang semakin senja Maria Ullfah merasa bahagia karena bangsanya telah lepas dari penjajahan negara asing. Apa yang Maria Ullfah cita-citakan ketika masih menempuh studi di Belanda hingga ia bekerja sebagai guru sekolah partikelir telah tercapai.

Kesehatan Maria Ullfah mulai menurun ketika memasuki tahun 1988. Sejak tanggal 13 Maret Maria Ullfah dirawat di unit perawatan infeksi di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat). Menurut Soebadio dalam wawancaranya dengan Koran Kompas (Sabtu 16 April 1988), Maria Ullfah dirawat di RSPAD karena menderita sakit bronchitis dan asma serta lambung berdarah.<sup>115</sup> Selama dirawat di ruang ICU RSPAD kondisi kesehatan Maria Ullfah selalu naik-turun. Sebagai seorang suami Soebadio dengan setia mendampingi Maria Ullfah di rumah sakit. Soebadio mengisahkan tentang kemesraan Maria Ullfah ketika dirawat di RSPAD. “Saya ingin tidur dipangkuanmu”, kata Maria Ullfah kepada Soebadio. Menurut Soebadio, istrinya tidak pernah mengungkapkan kemesraan secara verbal, apalagi di rumah sakit. Seorang perawat yang mendengar perkataan Maria Ullfah tersebut berkata, “Bapak dan Ibu pacaran, ya?”. Mendengar celotahan tersebut Maria Ullfah tersenyum bahagia. Hal tersebut merupakan ungkapan sayang yang terakhir Maria Ullfah kepada suaminya.

Maria Ullfah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 April 1988. Pukul 02.15 dinihari Maria Ullfah wafat dan meninggalkan Soebadio,

---

<sup>115</sup> Anonim, “Maria Ulfah Soebadio Sudah Tiada”, Kompas, Sabtu, 16 April 1988.

seorang anak angkat (Ir. Darmawan), dan empat cucu.<sup>116</sup> Turut hadir untuk melayat di rumah jalan Guntur 49 adalah Menteri Perekonomian Ekuin Radius Prawiro dan isteri, Menko Kesra Soepardjo Rustam, Mensesneg Moerdiono, Brigjen (Purn.) Alex Kawilarang, mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso dan Letjen (Purn.) Kemal Idris. Jenazah diberangkatkan dari rumah duka jalan Guntur 49 ke Masjid di Taman Sunda Kelapa untuk disembahyangkan pada pukul 11.00 WIB. Selanjutnya jenazah dibawa ke Gedung Kowani (Kongres Wanita Indonesia) di jalan Imam Bonjol untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Jenazah Maria Ullfah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata melalui sebuah upacara kenegaraan yang dipimpin Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Ny. A. Sulasikin Murpratomo. Pelayat yang ikut hadir dalam upacara pemakaman Maria Ullfah di Kalibata adalah Menteri Sosial Haryati Soebadio, Ny. Rahmi Hatta, Mayjen TNI Syaukat (sekretaris militer presiden), beberapa perwira dan Korps wanita AD, AL, AU dan Polwan.<sup>117</sup> Selama tujuh puluh enam tahun berjuang, akhirnya Maria Ullfah harus kalah dengan mautnya.

Seluruh usaha Maria Ullfah selayaknya dikenang dan terus diperjuangkan, karena bagi Maria Ullfah sendiri perjuangan tersebut belum seratus persen tuntas. Bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan harus terus berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi isteri, ibu, dan pendidik bagi generasi

---

<sup>116</sup> Mohamad Cholid, dkk, "Maria Ulfah Kekasih Abadi Soebadio", Tempo, 23 April 1988, hlm. 109.

<sup>117</sup> Anonim, *loc.cit.*,

penerus bangsa. Selama berjuang, Maria Ullfah telah membawa dampak positif bagi kedudukan kaum perempuan, yaitu:

1. Tercapainya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menjamin kedudukan kaum perempuan di dalam perkawinan.
2. Adanya pencantuman butir-butir taklik-talak pada buku nikah yang dapat memperkuat kedudukan kaum perempuan dalam suatu pernikahan, karena jika sewaktu-waktu terdapat perlakuan sewenang-wenang dari suami, isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan Agama.
3. Adanya potret suami isteri di dalam buku nikah (bersifat wajib), sehingga buku nikah tidak akan disalah gunakan oleh pihak tertentu.
4. Poligami bukan lagi hal yang mudah dilakukan, seorang suami yang ingin berpoligami harus melalui pengadilan agama dan ditentukan dengan syarat-syarat yang tidak mudah, serta pihak istri berhak menentukan untuk bersedia dimadu atau tidak. Selain itu, pihak suami harus mampu dan adil.
5. Pasal 27 UUD 1945, tentang pencantuman asas kesetaraan warga negara di dalam hukum tanpa pengecualian. Jadi kedudukan kaum perempuan di dalam hukum akan disamakan dengan laki-laki dan tidak lagi dibedakan.
6. Adanya hakim perempuan dalam pengadilan Agama.
7. Adanya partisipasi kaum perempuan dalam bidang militer, yaitu dengan adanya Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat).